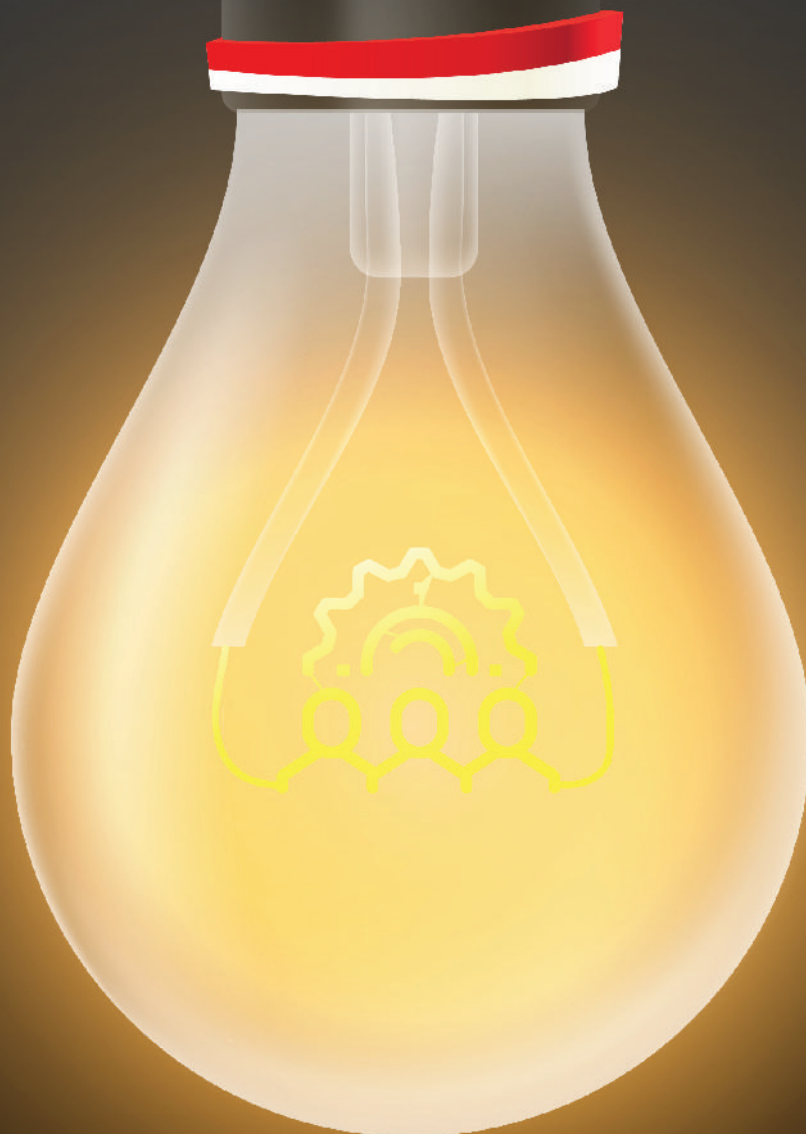


 Warta *For Accountability and Beyond*
Pengawasan

Edisi 1 2025



Elevating
Human Capital



Majalah Warta Pengawasan merupakan media informasi dan komunikasi di lingkungan aparat pengawasan serta sebagai sarana untuk memasyarakatkan konsep dan praktik pengawasan kepada seluruh lapisan masyarakat

Alamat Redaksi/Tata Usaha: Gedung BPKP Pusat Lantai 1 Jalan Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120 Tel/Fax. +6221-8591-0031, pes 0102 dan 0103. Desain cover oleh: Kominfo BPKP/Septian Agam. Diterbitkan Oleh: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Berdasarkan: Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-204/K/SU/2013 Tanggal 26 Maret 2013 STT Nomor: 958/SK/Ditjen PPG/STT/1982 Tanggal 20 April 1982, ISSN 0854-0519, Homepage: www.bpkp.go.id - Email: wartapengawasan@gmail.com. Dilarang mengutip atau memproduksi seluruh atau sebagian isi majalah tanpa seijin redaksi.

Majalah Warta Pengawasan dapat di unduh melalui



EDITOR'S NOTE

Selamat datang di edisi pertama majalah *Warta Pengawasan* tahun 2025. Edisi ini menjadi istimewa, karena tak hanya menandai awal tahun yang baru, tetapi juga semangat baru: ***“For Accountability and Beyond.”*** Sebuah *tagline* yang membawa semangat pengawasan melampaui batas tradisionalnya—menjadi kekuatan yang mendorong pembangunan berkelanjutan dan mengawal visi jangka panjang bangsa.

Dalam semangat baru ini, kita diingatkan kembali pada salah satu fondasi utama kemajuan bangsa: pendidikan.

Karena itu, mari kita renungkan sejenak pernyataan Daoed Joesoef, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang pernah mengatakan bahwa untuk meruntuhkan suatu negara cukup dengan menciptakan konflik berkepanjangan dan mengabaikan pendidikan anak bangsa. Sebuah peringatan yang terasa semakin relevan di masa sekarang. Kita lihat, baru-baru

ini, ribuan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di berbagai kota dengan membawa pesan keprihatinan terhadap masa depan pendidikan nasional. Mereka mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap mengabaikan sektor pendidikan, seperti pemangkasan anggaran pendidikan untuk membiayai program lain. Mahasiswa khawatir bahwa kebijakan tersebut akan merugikan kualitas dan masa depan pendidikan di Indonesia.

Kita sadari bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang tak boleh diacuhkan. Bahkan pendidikan menjadi salah satu amunisi untuk dapat memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Meski Indonesia menunjukkan peningkatan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menjadi tolok ukur seberapa maju suatu negara, namun kesenjangan kualitas pendidikan itu nyata. Akses tidak merata, tenaga pendidik yang belum optimal, serta sistem pembelajaran yang perlu adaptasi lebih cepat menjadi tantangan besar.

Pengelolaan anggaran pendidikan yang efektif, transparan, dan akuntabel menjadi kunci dalam memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar berdampak bagi peningkatan kualitas SDM. BPKP berperan dalam memastikan dana pendidikan digunakan secara optimal, sehingga pendidikan dapat benar-benar menjadi motor penggerak kemajuan bangsa, pembangun peradaban bangsa.

Terlebih kita punya visi Indonesia Emas 2045, pembangunan sumber daya manusia unggul yang menjadi fondasi utama dalam mencapai negara yang maju, sejahtera, dan berdaya saing di kancah global. Pendidikan yang berkualitas bukan hanya kebutuhan, tetapi keharusan agar Indonesia tidak tertinggal dalam dinamika perubahan dunia.

Nelson Mandela pernah berkata, *“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”* Namun mampukah senjata itu tetap tajam, jika diasah dengan kepedulian yang kian teredam?

Salam Redaksi

SUSUNAN REDAKSI

Pelindung: Kepala BPKP – **Pembina:** Wakil Kepala BPKP – **Pengarah** Sekretaris Utama –
Penasihat: Para Deputy Kepala BPKP – **Penanggung Jawab:** Gunawan Wibisono –
Pemimpin Umum: Riyanti Ridzki Dewi – **Wakil Pemimpin Umum:** Nurly Wulan Sari –
Pemimpin Redaksi: Yulia Pramita Rahman – **Pemimpin Administrasi:** Ristiandi Wijanarko –
Redaktur Pelaksana: Ayu Isni Arum – **Sekretaris Redaksi:** R. Hanifah –
Reporter: Dita Ariningrum, Wiwin Savitri, Putri Septanti Ismalia, Ferina Indah Pamaswari,
Pande Made Nancy Nareswari, Fuad Rizky, Rahma Yulyanti – **Keuangan:** Nurjana Ismet Tuah –
Desain Grafis: Viana Anggraeni Zahrin, Bintang Andhika Marta, Diana Nur Pertiwi, Septian Agam Wahyudi –
Administrasi: R. Hanifah – **Dokumentasi:** Idiya Zikra – **Sirkulasi:** Petrus Sonny Santoso Putra

CONTENTS

- 04** **ROUND UP**
- 06** **COVER STORY**
Elevating Human Capital: Sinergi Pengawasan dan Kebijakan Pendidikan Tinggi
- 13** **INDONESIA THIS QUARTER**
- 18** **INFOGRAPHIC**
- 20** **PUBLIC POLICY**
Elastisitas Demand Pendidikan dan Intervensi yang Diperlukan
- 25** **INTERNAL AUDITOR'S UPDATE**
Persyaratan Topikal: Tingkatkan Konsistensi, Kualitas dan Keandalan Audit
- 28** **INSIGHT**
Berguru di Negeri Kangguru, Menimba Ilmu di Negeri Tirai Bambu
- 33** **ORGANIZATIONAL CULTURE**
Quiet Quitting di Kalangan ASN, Berbahayakah?
- 38** **PREVIEW**





40

INSPIRING PERSON

Halim Ambiya, Pembuka Jalan Kaum Marginal

45

BOOK REVIEW

Bicara Itu Ada Seninya

48

MOVIE REVIEW

The Auditors

51

MINWAS'S STORY

Kawal Pendidikan, Kawal Masa Depan

52

THE BEAUTY OF INDONESIA

Mengunjungi Suku Dayak, Emang Bisa?

KOLOM ILMIAH

-

02 Pengaruh Belanja Pendidikan dan Kualitas Guru Terhadap Kualitas dan Distribusi Pendidikan di Indonesia

14 Analisis Bantuan Pendidikan pada Siswa Miskin di Indonesia: Studi Kasus di SMP di Kabupaten Hinai dan Tanjung Pura Kabupaten Langkat



ROUND UP

Human capital jika diurai dari segi etimologi merupakan penggabungan dari unsur manusia dan modal. Dari penggabungan tersebut, *human capital* didefinisikan sebagai gagasan tentang perlunya investasi pada Sumber Daya Manusia (SDM) karena investasi ini akan meningkatkan produktivitasnya sehingga ia dapat semakin bernilai bagi suatu organisasi, menjadi modal bagi organisasi tersebut untuk mencapai tujuan. Apabila organisasi berbentuk perusahaan, *human capital* akan berkontribusi pada *sustainable revenue*. Sementara, jika organisasi tersebut adalah suatu negara, *human capital* akan membangun fondasi yang kuat bagi kemajuan ekonomi, sosial, dan politik yang berkelanjutan.

Mengapa *human capital* sangat penting? Indonesia bisa dibilang “beruntung” karena dianugerahi kekayaan alam yang sangat menakjubkan. Namun demikian, jika Indonesia hanya mengandalkan modal sumber daya alam yang sifatnya terbatas, pembangunan nasional tidak akan *sustainable*. SDM harus ditempatkan sebagai bagian sentral dalam pembangunan, sebagai subjek dan objek. Untuk itu, upaya penguatan *human capital* menjadi salah satu prioritas dalam agenda pembangunan nasional.

Optimisme pemerintah dalam meningkatkan *human capital* tercermin

pada target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029 dimana Indonesia menargetkan Indeks Modal Manusia (IMM) meningkat dari 0,54 pada tahun 2020 menjadi 0,59 pada tahun 2029. IMM adalah metode ukur yang merefleksikan potensi kontribusi SDM terhadap pertumbuhan ekonomi, berdasarkan keterjangkauan akses dan kualitas pembangunan yang terjadi selama tumbuh kembang manusia. Komponen IMM meliputi angka kelangsungan hidup usia anak (< 5 tahun), angka kelangsungan hidup usia dewasa produktif (15-60 tahun), prevalensi stunting, harapan lama sekolah, serta kualitas pembelajaran selama periode sekolah.

Faktor-faktor yang akan menentukan IMM diantaranya investasi dalam pendidikan dan kesehatan; kebijakan fiskal, moneter, dan jaring perlindungan sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif; serta lingkungan yang sehat dan harmonis secara fisik, sosial, dan budaya.

Emerging human capital membutuhkan upaya nyata yang komprehensif serta koordinasi dan sinergi seluruh elemen pemerintah. Tim Warta Pengawasan telah mewawancarai berbagai narasumber yang kompeten untuk mengurai potensi dan kendala pemerintah dalam merealisasikan penguatan *human capital*.



Dari sisi pendidikan, menurut Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Prof. Stella Christie; penguatan ekosistem dan tata kelola riset yang kompetitif sangat esensial karena di negara-negara maju, riset menjadi investasi utama dalam pembangunan. Kemudian, menurut Guru Besar Bidang Administrasi Bisnis Politeknik STIA LAN Jakarta Prof. Dr. R. Luki Karunia, Perguruan Tinggi Kedinasan dan Lembaga (PTKL) memiliki peran penting dalam mencetak SDM yang unggul. Menguatkan pernyataan Luki, Ketua Program Studi S1 - Akuntansi Universitas Pancasila Rafrini Amyulianthy, menekankan pentingnya pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE) dalam sistem pembelajaran serta *sistem tata kelola PTKL yang transparan dan akuntabel*.

Pada edisi ini, kita juga akan melihat bagaimana upaya penguatan SDM dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran. Sebagai insight, kita tilik praktik pendidikan di negara Tirai Bambu.

Dukungan dari para profesional dan masyarakat juga menjadi amunisi untuk meningkatkan *kontribusi* SDM dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.



ELEVATING HUMAN CAPITAL:

SINERGI PENGAWASAN DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGGI

Pendidikan di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang, dari sistem kolonial yang diskriminatif hingga sekarang menjadi pilar utama pembangunan nasional. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan hanya diperuntukkan bagi segelintir elite pribumi, sementara mayoritas rakyat tidak memiliki akses terhadap pendidikan yang layak. Kesenjangan ini menciptakan struktur sosial yang sulit ditembus dan menghambat mobilitas ekonomi masyarakat (Sultani & Kristanti, 2020). Setelah kemerdekaan, pendidikan menjadi agenda utama negara dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Namun, tantangan tidaklah berhenti setelah kemerdekaan. Dari era Orde Baru yang menekankan sentralisasi pendidikan hingga Reformasi yang membawa desentralisasi, sistem pendidikan di Indonesia terus beradaptasi. Pandangan akademisi dan praktisi pendidikan menyoroti bahwa meskipun desentralisasi memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan pendidikan, hal ini juga

menciptakan ketimpangan kualitas antara daerah maju dan tertinggal (Ishaq, 2006).

Seiring dengan perkembangan sistem pendidikan, muncul kesadaran bahwa pendidikan bukan hanya hak dasar, tetapi juga investasi strategis bagi pembangunan bangsa. Pada tingkat yang lebih lanjut, pendidikan tinggi berperan menjadi pintu gerbang yang menghubungkan dunia akademik dengan dunia profesional, memastikan lulusan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan industri.

Hidupkan Pendidikan Tinggi dengan Riset

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan riset dan pendidikan tinggi. Menurut Prof. Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), riset harusnya tersebar di universitas agar ilmu terus berkembang dan hadirkan inovasi berkelanjutan. Di China dan AS, mayoritas riset dilakukan di perguruan tinggi untuk memastikan perputaran pengetahuan yang dinamis. Sebaliknya, riset yang terlalu terpusat melemahkan ekosistem inovasi.



Prof. Stella juga menekankan pentingnya tata kelola riset yang lebih kompetitif agar menghasilkan inovasi yang benar-benar berdampak. Salah satu tantangan terbesar adalah pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.

"Karena kalau untuk bangun jembatan, bangun sekolah, bangun apa itu kan mudah dilihatnya. Tapi riset itu kan tidak bisa begitu," ujar Prof. Stella menyoroti tantangan dalam pertanggungjawaban penggunaan APBN untuk riset.

Berbeda dengan infrastruktur fisik yang hasilnya kasat mata, riset menghasilkan keluaran yang tidak selalu terukur secara konkret, meskipun tetap memberikan manfaat besar. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dengan BPKP agar mekanisme pengawasan tetap akurat dan adil, tanpa menyamaratakan pendekatan dengan proyek infrastruktur. *"Jadi itu yang kita perlukan bersama lebih lanjut,"* tambahnya, menegaskan perlunya sinergi dalam memastikan pertanggungjawaban riset tetap transparan namun tidak menghambat inovasi.

Selain itu, dukungan terhadap peneliti juga menjadi faktor penting. Dalam

wawancara, Prof. Stella mengungkapkan bahwa saat ini dana riset Indonesia hanya 0,28% dari PDB, jauh dari ideal. Padahal, di banyak negara maju, riset menjadi investasi utama dalam pembangunan. Insentif bagi peneliti juga masih terbatas, padahal secara regulasi tidak ada larangan bagi mereka untuk mendapatkan penghargaan yang layak. Tanpa insentif yang memadai, sulit mendorong riset yang berkelanjutan.

Di sisi lain, ekosistem riset juga perlu diperbaiki agar hasil penelitian memiliki *outtaker* atau pihak yang siap memanfaatkannya. Banyak penelitian yang berakhir tanpa implementasi karena tidak tersambung dengan industri atau kebutuhan masyarakat. Misalnya, dalam ketahanan pangan, efisiensi penggilingan padi di Indonesia hanya 50%, padahal dengan inovasi sederhana, angka ini bisa meningkat signifikan.

Selain manfaat ekonomi dan inovasi, riset juga berperan penting dalam membentuk keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. *Critical thinking, problem-solving,* dan adaptasi terhadap perubahan industri semuanya dapat dikembangkan melalui pengalaman riset. Oleh karena itu, memperkuat budaya riset di perguruan tinggi bukan hanya untuk kepentingan akademik, tetapi juga untuk menyiapkan lulusan yang lebih kompetitif di pasar kerja.

Sebagai strategi, Prof. Stella menegaskan perlunya memperbanyak riset di universitas, memperjelas prioritas nasional, serta memperbaiki sistem insentif bagi peneliti dan perguruan tinggi. Dengan ekosistem riset yang lebih kuat, pendidikan tinggi bisa menjadi motor penggerak kemajuan bangsa.

Meningkatkan Mutu PTKL untuk Mencetak SDM Unggul

Perguruan Tinggi Kedinasan dan Lembaga (PTKL) memiliki peran penting dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul, khususnya dalam sektor pemerintahan dan tata kelola keuangan negara. Namun, dalam menjalankan fungsinya, PTKL menghadapi tantangan dalam peningkatan kualitas pendidikan, relevansi kurikulum, serta penguatan tata kelola akademik.

Menurut Prof. Dr. R. Luki Karunia, SE.Ak., MA., CA., CACP, dalam wawancara tertulis menyampaikan bahwa tantangan utama PTKL adalah menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya berbasis teori, tetapi juga mampu menghasilkan lulusan dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. *"Mutu pendidikan tinggi sangat bergantung pada bagaimana kita menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri dan sektor publik. Jika lulusan PTKL hanya dibekali teori tanpa pemahaman praktis, maka akan sulit bagi mereka untuk langsung beradaptasi di dunia kerja,"* ujarnya.



Luki Karunia



Rafrini Amyulianthy

Sementara itu, Rafrini Amyulianthy, Ph.D., C.A., C.M.A., CSRS., AseanCPA, menekankan pentingnya pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE) dalam sistem pembelajaran. *"Pembelajaran berbasis hasil akan memastikan mahasiswa benar-benar memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan profesionalisme di dunia kerja. Perguruan tinggi harus berani melakukan perubahan, termasuk memperbanyak program magang dan kerja sama dengan industri,"* jelasnya.

Lebih lanjut, Prof. Luki menyoroti pentingnya penguatan tata kelola akademik dan akuntabilitas dalam PTKL. *"Sebagai institusi yang mencetak SDM untuk sektor publik, PTKL harus memiliki sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel. Kualitas dosen, evaluasi kinerja akademik, serta sistem penjaminan mutu harus ditingkatkan agar lulusan yang dihasilkan benar-benar memenuhi standar kompetensi,"* ungkapnya.

Selain itu, Rafrini juga menambahkan bahwa kolaborasi dengan dunia internasional menjadi aspek yang semakin penting dalam meningkatkan mutu PTKL. *"Perguruan tinggi harus mulai memperluas jejaringnya dengan institusi*

pendidikan global. Program pertukaran mahasiswa dan dosen, riset bersama, serta pengakuan sertifikasi internasional akan meningkatkan daya saing lulusan kita," tuturnya.

Dengan perbaikan sistem pendidikan dan tata kelola akademik yang berkelanjutan, PTKL dapat terus mencetak SDM unggul yang profesional dan siap menghadapi tantangan dalam dunia pemerintahan.

Pendidikan Tinggi dan Tantangan Efisiensi

Pendidikan tinggi berperan penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Namun, efisiensi anggaran di sektor pendidikan kini menjadi sorotan, terutama terkait dampaknya terhadap akses pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, dan keberlanjutan program-program pendidikan.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai pemangkasan anggaran pendidikan dapat memperburuk berbagai persoalan yang sudah ada. *"Kalau bicara SDM, anggaran pendidikan mestinya ditambah, bukan malah dipangkas,"* ujarnya. Ia khawatir, kebijakan ini akan meningkatkan angka anak putus sekolah serta mengancam pemenuhan anggaran minimal 20% dari APBN yang telah diamanatkan konstitusi.

"Anggaran pendidikan kita dipotong di semua jenjang, bahkan dana BOS, PIP, dan KIP Kuliah dikurangi. Jika mandatory spending 20 persen ini tidak terpenuhi, itu bisa dianggap inkonstitusional," tegasnya. Selain itu, pemangkasan ini berisiko menurunkan kesejahteraan guru dan dosen, memperlambat perbaikan sekolah, serta menghambat



pembangunan fasilitas pendidikan di daerah yang membutuhkan.

Menurut Ubaid, anggaran yang tersisa harus benar-benar difokuskan pada kebutuhan utama, seperti pembiayaan pendidikan anak, kesejahteraan tenaga pendidik, serta perbaikan dan pembangunan sekolah. Ia juga menyoroti bahwa biaya pendidikan semakin mahal, sementara pemerintah belum sepenuhnya mengarahkan kebijakan untuk menjamin akses pendidikan yang lebih terjangkau bagi semua anak.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, harapannya adalah agar pemerintah tetap berkomitmen pada amanah konstitusi. Pendidikan bukan sekadar angka dalam APBN, tetapi juga investasi bagi masa depan bangsa.

Peran Strategis BPKP dalam Pengawasan Pendidikan

Dalam pernyataannya Deputi Polhukam PMK BPKP, Iwan Taufik, menegaskan bahwa sektor pembangunan manusia menjadi prioritas utama pengawasan BPKP. Oleh karena itu pembangunan manusia dalam Agenda Prioritas



Iwan Taufik

Pengawasan BPKP ditempatkan menjadi sektor paling pertama, dan pendidikan menjadi fokus pertama dalam pengawasan pembangunan manusia tersebut. Adapun lingkup pengawasan pendidikan mencakup:

- Peningkatan aksesibilitas melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan
- Akuntabilitas Program Makan Bergizi Gratis
- Optimalisasi Dana Bantuan Pendidikan
- Peningkatan kualitas untuk mendorong pendidikan berkelanjutan
- Keterserapan lulusan sekolah vokasi, perguruan tinggi dan perguruan tinggi kedinasan
- Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga kependidikan (Guru, Dosen, Instruktur)
- Pemanfaatan Riset dan Inovasi untuk Pembangunan

Tantangan dan Solusi dalam Pengawasan Pendidikan

Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Dikdik Sadikin, dalam sesi wawancara menyoroti bahwa aksesibilitas dan kualitas masih menjadi

dua tantangan utama dalam sektor pendidikan tinggi. *"Pendidikan itu bukan sekadar hak bagi mereka yang mampu. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa masyarakat cerdas memiliki peluang yang sama,"* ujarnya.

Oleh karena itu, pengawasan pendidikan ini menjadi penting agar kebijakan pendidikan yang telah dirancang dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sebagai contoh, Dikdik menyoroti permasalahan pendataan penerima bantuan program pendidikan, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, yang pada saat itu (tahun 2022) mengalami kesalahan data. Dimana ada siswa yang tidak layak menerima bantuan, sementara yang benar-benar membutuhkan malah terlewat. Untuk mengatasi masalah ini, BPKP merekomendasikan pemadanan data siswa dengan data kesejahteraan untuk meningkatkan akurasi penerima manfaat. Setelah sistem diperbaiki, kesalahan data berkurang secara signifikan, sehingga siswa/ mahasiswa miskin dan rentan miskin memiliki peluang yang lebih besar dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.



Dikdik Sadikin



la juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan tinggi. “Jika pengelolaan anggaran lebih transparan dan efisien, biaya kuliah bisa lebih terjangkau, dan akses pendidikan bisa lebih merata,” pungkasnya.

Pendidikan, Eskalator Menuju Masa Depan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2014–2017, Anies Baswedan, dalam Ramadan Public Lecture mengungkapkan analogi menarik: pendidikan bukan sekadar tangga yang harus dinaiki satu per satu, tetapi harus seperti eskalator yang mempercepat mobilitas sosial dan ekonomi seseorang. Karena jika pendidikan hanya dianggap sebagai tangga, maka tidak semua orang akan sampai ke puncak. Namun, jika sistem pendidikan dirancang sebagai eskalator sosial dan ekonomi, maka lebih banyak individu yang dapat mempercepat mobilitas mereka menuju kesejahteraan.

Di sinilah pentingnya sinergi antara kebijakan, pengawasan, dan inovasi

dalam dunia pendidikan. Dengan pengawasan dari BPKP, kebijakan pendidikan tinggi dapat lebih efektif dalam menciptakan SDM unggul yang siap bersaing di era global. Pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan masyarakat pun perlu berkolaborasi untuk memastikan bahwa pendidikan benar-benar menjadi jalan terang menuju kemajuan bangsa. Seperti cover majalah edisi ini yang menampilkan cahaya lampu yang menerangi kegelapan, pendidikan memiliki peran serupa—menjadi penerang yang membuka jalan menuju masa depan yang lebih benderang.

(Yulia Pramita R., Fuad Rizky)

REFERENSI

- Ishaq, I. (2006). Membangun visi bersama: Aspek-aspek penting dalam reformasi pendidikan. Yayasan Obor Indonesia.
- Sultani, Z. I. M., & Kristanti, Y. P. (2020). Perkembangan dan pelaksanaan pendidikan di zaman kolonial Belanda di Indonesia abad 19-20. *Jurnal Artefak*, 7(2), 91-106.
- "Pembangunan Infrastruktur Pendidikan dpt Meningkatkan Kualitas Manusia?" Ramadhan Public Lecture (2025). <https://www.youtube.com/live/9O3MYA7lt4Y?si=JozWoukD7jHHyyYu>

EFISIENSI ANGGARAN, BPKP FOKUS PENGAWASAN PRIORITAS DAN JAGA KUALITAS



Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menegaskan tetap menjaga kualitas pengawasan meskipun mengalami efisiensi anggaran sebesar 471 miliar rupiah. Hal ini disampaikan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta.

Ateh menyebutkan bahwa pengawasan akan difokuskan pada program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), transformasi ekonomi, ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur. Anggota Komisi XI DPR RI mengapresiasi langkah BPKP dalam menjaga efektivitas pengawasan serta mendorong agar fokus juga diberikan pada pengawasan di tingkat bawah.

BPKP RAIH PENGHARGAAN ENTITAS TERBAIK DALAM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meraih penghargaan sebagai entitas terbaik dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan capaian di atas 90 persen.

Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh menegaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan bukan sekadar rutinitas, melainkan untuk menjaga akuntabilitas setiap rupiah uang negara yang dikelola oleh BPKP.

BPKP yakin bahwa hasil audit BPK bermanfaat dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah.







PRESIDEN PRABOWO LANTIK KEPALA DAN WAKIL KEPALA BPKP

Presiden Prabowo Subianto melantik Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP dalam upacara di Istana Negara. Pelantikan ini berdasarkan Keppres Nomor 27/P Tahun 2025.

Selain Kepala dan Wakil Kepala BPKP, Presiden juga melantik Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kepala BSSN, serta Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik. Pelantikan ini diharapkan memperkuat efektivitas pemerintahan dalam mewujudkan visi pembangunan nasional.

PELUNCURAN IPKD MCP 2025: PERKUAT PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN KORUPSI DAERAH

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meluncurkan Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring



Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 di Pusat Edukasi Antikorupsi KPK.

Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD, Raden Suhartono menekankan pentingnya penguatan pengendalian kecurangan dan pemetaan risiko dalam tata kelola pemerintahan daerah. Ia juga menyoroti perlunya perencanaan berbasis kinerja, penguatan struktur risiko, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.

Dengan IPKD MCP 2025, sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam pencegahan korupsi diharapkan semakin kuat, meningkatkan transparansi, serta membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

KEMENHAN DAN BPKP PERKUAT KERJA SAMA UNTUK TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK



Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menandatangani Perjanjian Kerja Sama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

BPKP berkomitmen mendukung pengawasan intern, evaluasi sistem pengendalian, serta peningkatan kapabilitas auditor di Kemenhan. Kolaborasi ini diharapkan semakin memperkuat tata kelola sektor pertahanan dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.

BPKP DAN KPK KONSOLIDASI STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membahas strategi efektivitas pemberantasan korupsi.

Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh menegaskan bahwa sinergi antara BPKP dan KPK sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

BPKP berperan dalam pengawasan dan pencegahan korupsi melalui peningkatan tata kelola, edukasi, serta audit investigatif untuk mendukung aparat penegak hukum.



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

(IPM) 2024

Umur **harapan hidup**
saat lahir
74,15 tahun

Rata-rata
Lama Sekolah
8,85 tahun
Harapan
lama sekolah
13,21 tahun



IPM 2024
75,02

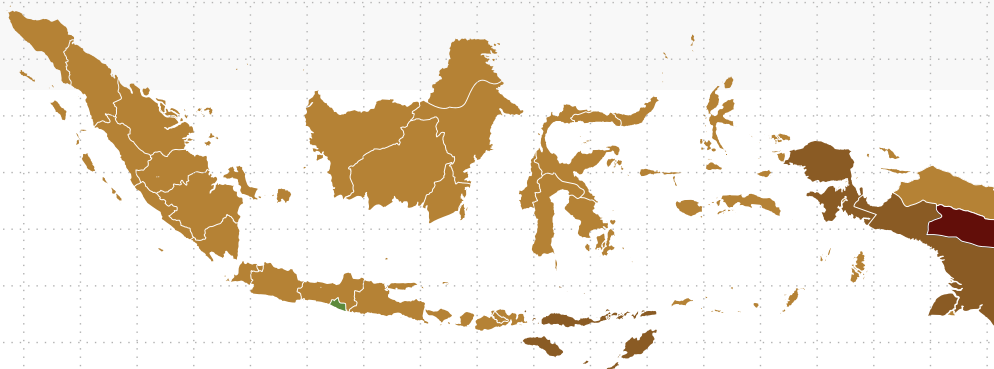
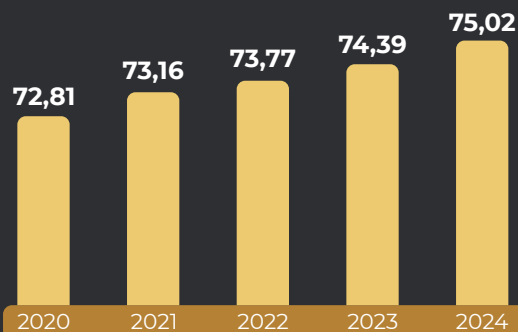
Pengeluaran Riil
per Kapita per Tahun
yang Disesuaikan
Rp12.341.000

Ilustrasi
Diana Nur
Pertiwi

Pertumbuhan IPM 2024

 **0,85%**

IPM
2020-2024



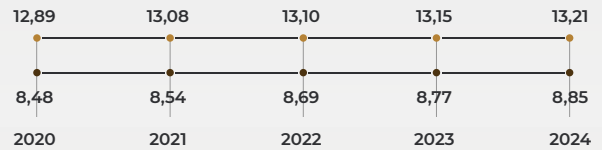
Kategori IPM

-  Sangat Tinggi
-  Tinggi
-  Sedang
-  Rendah

Sumber: BPS

Harapan Lama Sekolah/HLS (Tahun)

- Mengalami peningkatan **0,06 tahun (0,46%)** dibandingkan tahun 2023. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 (0,43%)



Rata-rata Lama Sekolah/RLS (Tahun)

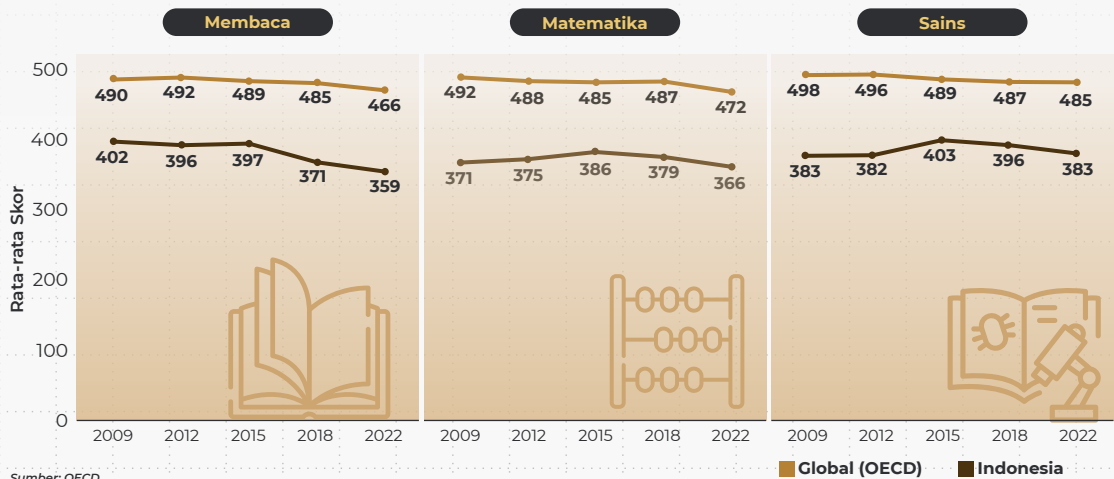
- Mangalami peningkatan 0,08 tahun (0,91%) dibandingkan tahun 2023, melambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan (2020-2023 (1,13%))

—●— HLS —●— RLS

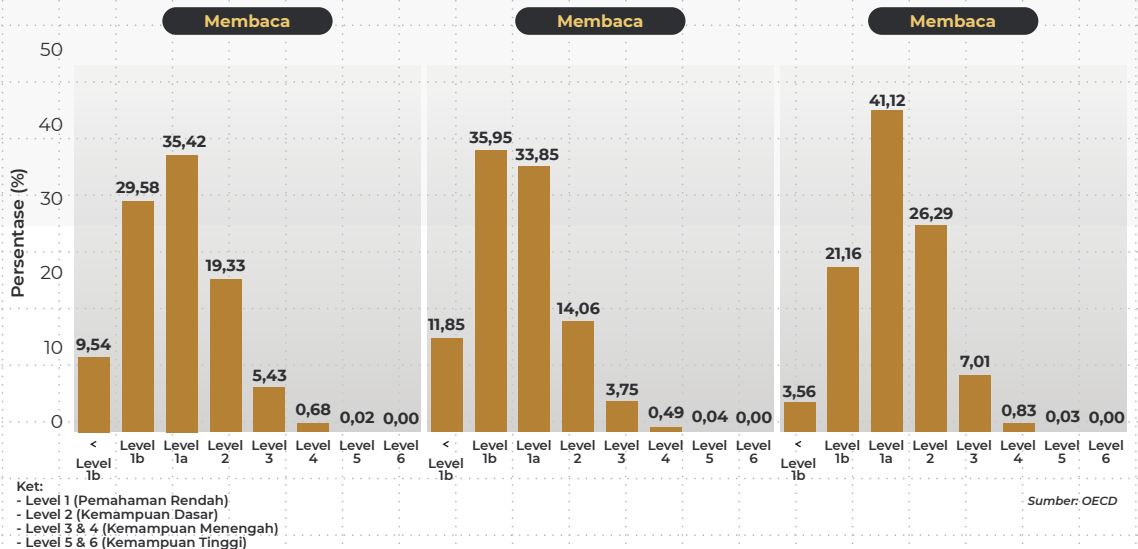
Sumber: BPS



Tren Hasil PISA Indonesia - Rata-Rata Skor (2009-2022) (Subjek Kemampuan Membaca, Matematika, dan Sains, Usia 15 Tahun)



Hasil PISA Indonesia - Presentase Jumlah Siswa Berdasarkan Level Kemampuan (2022) (Subjek Kemampuan Membaca, Matematika, dan Sains, Usia 15 Tahun)



ELASTISITAS *DEMAND* PENDIDIKAN DAN INTERVENSI YANG DIPERLUKAN

Daniel Wawone Yuniar Basar,
Auditor Ahli Muda pada Deputi Bidang PIP Bidang Politik, Hukum,
Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



Pendidikan adalah investasi masa depan, tapi pernahkah kita berpikir, mengapa orang tua tetap menyekolahkan anaknya meskipun biaya sekolah terus meningkat? Atau mengapa sekolah swasta semakin diminati meskipun sekolah negeri tersedia secara gratis? Dalam ilmu ekonomi, ada konsep **elastisitas demand (permintaan)**, yaitu seberapa besar *demand*/permintaan berubah ketika terjadi kenaikan/penurunan harga. Pendidikan sebagai salah satu komoditas yang tergolong *demand-driven*, memiliki dua sisi elastisitas permintaan, terdapat sisi pendidikan yang tergolong **inelastis**, yaitu yang membuat seseorang tetap bersekolah meski terjadi perubahan harga, dan terdapat sisi pendidikan yang **elastis**, yaitu yang membuat seseorang berpindah atau setidaknya memilih sekolah atau tidak bersekolah sama sekali karena adanya perubahan harga.

Apa yang Membuat Permintaan Pendidikan Elastis atau Inelastis?

Mengapa suatu komoditas dapat dikatakan elastis dan lainnya inelastis? Secara teori, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi elastisitas permintaan komoditas, di antaranya, adalah ketersediaan barang pengganti, waktu, pendapatan, proporsi pengeluaran, kebiasaan, harga, tingkat kebutuhan, komoditas komposit, dan urgensi. Dengan melihat beberapa faktor tersebut, elastisitas permintaan bergantung pada bagaimana konsumen memersepsikan dan mempreferensikan suatu komoditas. Dengan pemahaman ini, pembuat kebijakan dapat memformulasi peraturan atau kebijakan yang dapat mengarahkan persepsi dan preferensi konsumen. Dalam

konteks pendidikan sebagai komoditas, pemerintah dapat menciptakan intervensi yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam melihat pendidikan sebagai sesuatu yang penting.

Wajib Belajar: Mengapa Pendidikan Dasar Dianggap Vital?

Salah satu intervensi pemerintah terkait pendidikan adalah kebijakan wajib belajar. Namun, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang berlaku hanya mewajibkan belajar hingga jenjang SMP (9 tahun). Intervensi ini berhasil mempengaruhi masyarakat untuk memiliki persepsi bahwa pendidikan dasar itu penting. Di sebagian besar wilayah di Indonesia, pendidikan dasar dianggap penting karena dapat membantu seseorang beraktivitas dan berusaha dalam meningkatkan pendapatan. Masih ingatkah para pembaca tentang iklan layanan masyarakat yang menyebutkan “ingin mencapai cita-cita tapi membaca saja sulit”? Lebih lanjut, bahkan, iklan layanan masyarakat itu menyebutkan bahwa karena keterbatasan membaca, hal ini menyulitkan dalam pergaulan (“teman-teman malu main denganku” – karena sulit membaca). Iklan tersebut mengingatkan pentingnya pendidikan, terutama jenjang dasar – yang memungkinkan seseorang untuk setidaknya dapat membaca. Karena adanya persepsi tersebut, hal ini membuat karakteristik *demand* pendidikan pada jenjang dasar menjadi *somewhat* inelastis. Selain itu, berbagai intervensi pemerintah juga terfokus pada pendidikan jenjang dasar sehingga pengaruh harga tidak menjadi isu bagi masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya di jenjang SD-SMP.

Mengapa harus sekolah kalau sudah bisa menghasilkan uang?

Sayangnya, persepsian masyarakat miskin dan rentan miskin tentang pentingnya pendidikan hanya sebatas pada jenjang dasar. Bagi kelompok masyarakat ini, jika memang sudah dinyatakan dewasa untuk dapat bekerja, maka mengapa harus menempuh jenjang pendidikan berikutnya? Semakin dini untuk membantu perekonomian keluarga semakin baik. Belum lagi, pendidikan jenjang menengah (SMA/ sederajat) selalu diwarnai dengan berbagai biaya, meskipun sebenarnya intervensi yang sama seperti jenjang dasar (SD dan SMP) juga digelontorkan pada jenjang menengah ini, seperti iuran gratis, bantuan beasiswa, dan seterusnya. Namun, ada saja biaya yang dibutuhkan pada jenjang menengah, seperti biaya praktik ini-itu, biaya *outing*, biaya ekstrakurikuler, biaya tambahan untuk buku dan referensi, dan seterusnya. Tidak hanya itu, ongkos pulang pergi menuju SMA Sederajat juga lebih tinggi, karena biasanya sekolah jenjang menengah ini hanya terbatas pada wilayah pusat kota/kabupaten saja. Tidak seperti jenjang dasar yang memiliki layanan pendidikan bahkan hingga pelosok terjauh.

Atas pertimbangan tersebut, masyarakat miskin dan rentan miskin akan cenderung mengurungkan niat untuk menyekolahkan anaknya hingga jenjang SMA sederajat karena adanya isu biaya yang lebih mahal, dan kemampuan si anak untuk dapat membantu perekonomian keluarga. Dengan demikian, pada jenjang menengah, karakteristik *demand* pendidikan sudah menjadi elastis, untuk masyarakat miskin dan rentan miskin. Artinya, untuk



mendorong keberlanjutan pendidikan terutama hingga jenjang SMA sederajat, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai faktor tersebut dan menyediakan bantuan yang lebih besar dan/atau disertai dengan *enforcing* (mewajibkan) atas pelaksanaan kebijakan pendidikan. Permasalahannya, kebijakan Sisdiknas-nya sendiri hanya mewajibkan belajar sampai dengan jenjang SMP saja. Jadi, terbatasnya intervensi pada jenjang SMA sederajat akan terus menjadi permakluman selama belum ada perubahan kebijakan SISDIKNAS terkait wajib belajar.

Bagaimana dengan preferensi dan elastisitas *demand* pendidikan?

Preferensi masyarakat atas pendidikan akan dipengaruhi oleh pendapatan, proporsi pengeluaran, tingkat kebutuhan, dan urgensi. Masyarakat miskin dan



rentan miskin akan cenderung memiliki preferensi yang terbatas. Misalnya, mereka hanya akan memiliki preferensi untuk menyekolahkan atau tidak menyekolahkan anaknya. Sementara itu, masyarakat menengah dan atas akan memiliki preferensi yang lebih banyak. Masyarakat menengah dan atas tidak hanya berpikiran untuk menyekolahkan atau tidak menyekolahkan anaknya, melainkan juga terkait sekolah dengan kualitas seperti apa yang akan dipilih. Jika preferensi dipengaruhi pendapatan, alokasi pengeluaran, tingkat kebutuhan, dan urgensi, *demand* pendidikan pada kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin akan semakin elastis. Artinya, *demand* pendidikan pada kelompok ini akan sangat sensitif terhadap biaya/harga. Semakin tinggi biaya pendidikan, semakin besar proporsinya terhadap pengeluaran, semakin rendahnya tingkat

kebutuhan dan urgensi, maka kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin akan cenderung memilih untuk tidak menyekolahkan anak-anaknya (sangat sensitif terhadap biaya/harga).

Sementara itu, kelompok masyarakat menengah dan atas dengan preferensi yang luas, akan cenderung memiliki karakteristik *demand* pendidikan yang lebih inelastis. Kelompok masyarakat ini akan melihat pentingnya peran pendidikan terlebih dahulu. Jadi bagi kelompok ini, meski mahal, anak-anak mereka tetap harus mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Layanan pendidikan berkualitas tersebut seperti berstandar internasional, memiliki dukungan teknologi informasi dan komputer (TIK) yang mumpuni, *outing* ke luar negeri atau bahkan luar angkasa! Dalam bentuk minimalnya, kelompok masyarakat ini menginginkan sekolah yang mampu mendidik anak-anak mereka terkait nilai-nilai yang dimuliakan di masyarakat, atau setidaknya anak-anak mereka tidak pulang ke rumah dengan perbendaharaan kata kasar dan umpatan yang mereka pelajari dari pergaulan di sekolah. Nah, karena kebutuhan dan pentingnya kualifikasi atas layanan pendidikan inilah, kelompok masyarakat ini rela merogoh koceknya untuk menyekolahkan anak-anak mereka.

Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah?

Dengan memahami karakteristik elastisitas *demand* pendidikan, pemerintah seharusnya dapat melakukan intervensi secara spesifik. Pertama, pemerintah harus terus menjaga persepsi bahwa pendidikan jenjang dasar merupakan fondasi yang penting bagi seorang anak. Di sisi lain,



pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menanamkan gagasan bahwa pendidikan tidak hanya penting pada jenjang dasar melainkan juga pada jenjang menengah dan lebih tinggi. Pemerintah harus meyakinkan masyarakat untuk tidak berhenti mengenyam pendidikan di jenjang dasar. Peluang untuk meningkatkan kesejahteraan akan lebih besar jika memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kedua, pemerintah perlu menggenjot intervensi pada jenjang menengah, atau setidaknya mengendalikan biaya/harga pada jenjang menengah, jika pemerintah menginginkan masyarakatnya memiliki rata-rata pendidikan yang tidak hanya terbatas pada jenjang dasar (8–9 tahun). Intervensi tersebut utamanya dilakukan pada kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin, yang sangat sensitif (memiliki *demand* yang elastis) atas pendidikan jenjang menengah. Pengendalian biaya juga tidak hanya terkait biaya sekolah melainkan juga biaya hidup dari keluarga yang akan

menyekolahkan anaknya. Keluarga dari kelompok miskin dan rentan miskin, memiliki *trade-off* kehilangan salah satu penghasilan keluarga jika menyekolahkan anak mereka di jenjang menengah. Oleh karena itu, memastikan biaya sekolah yang murah tidak cukup bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin untuk menjamin anak mereka menyelesaikan sekolah hingga jenjang menengah. Terakhir, pemerintah perlu merevisi kebijakan yang mewajibkan pendidikan hingga jenjang dasar (SMP/ sederajat) menjadi jenjang menengah (SMA/ sederajat). Langkah ini diperlukan untuk semakin memperbesar intervensi pada jenjang menengah. Dengan perubahan kebijakan ini, Lembaga swadaya dan swasta juga dapat mewujudkan pencapaian rata-rata pendidikan masyarakat hingga jenjang menengah. Serta dengan kebijakan yang lebih terarah, setiap anak, dari desa hingga kota, dari keluarga mampu hingga kurang mampu, memiliki kesempatan yang sama untuk menyeberang menuju kehidupan yang lebih baik.

PERSYARATAN TOPIKAL:

TINGKATKAN KONSISTENSI,
KUALITAS, DAN KEANDALAN AUDIT

Praktik audit internal terus berkembang menyesuaikan lingkungan, ekspektasi pemangku kepentingan, regulasi, ancaman risiko baru, dan faktor-faktor lainnya. Standar audit ditetapkan bukan untuk membatasi penilaian auditor atau membatasi pendekatan berbasis risiko terhadap audit internal, melainkan sebagai pedoman bagi auditor dalam menjaga mutu pekerjaan. Pernahkah Pembaca terpikirkan tentang “*extension*” dari standar audit? *Extension* dimaknai sebagai sebuah pelengkap untuk memperjelas penerapan standar secara lebih praktis dan kontekstual agar tercipta kerangka kerja audit yang konsisten secara global. Inilah yang disebut dengan Persyaratan Topikal.

The IIA's Global Guidance Council bertugas mengembangkan Persyaratan Topikal, termasuk memelihara inventaris topik yang dapat dipertimbangkan dalam *extension* ini. Topik-topik tersebut disusun dan diprioritaskan berdasarkan berbagai sumber, termasuk survei risiko global, laporan eksternal yang menyoroti tren dan risiko global, masukan dari The IIA's Global Assembly, serta inisiatif Visi 2035 dan *Global Risk in Focus*.

Sebuah topik dapat dikembangkan menjadi Persyaratan Topikal jika bidang subjeknya stabil dan matang. Keamanan siber contohnya, merupakan risiko yang meluas dan relevan bagi sebagian besar organisasi, sehingga merupakan pilihan yang sangat baik sebagai Persyaratan Topik pertama. Sedangkan topik yang baru muncul (seperti kecerdasan buatan) yang dianggap terlalu fleksibel untuk ditetapkan sebagai Persyaratan Topikal, dapat dipertimbangkan dan ditambahkan ke inventaris untuk masa mendatang.

Persyaratan Topikal mengutamakan topik yang mewakili risiko substansial bagi sebagian besar organisasi dan topik yang kemungkinan akan dimasukkan dalam siklus perencanaan audit. Namun demikian, audit internal memiliki fleksibilitas. Persyaratan Topikal bukanlah program kerja audit yang komprehensif, serta tidak menetapkan jumlah dan sifat uji audit yang harus dilakukan. Program dan pendekatan pengujian harus ditentukan berdasarkan penilaian auditor, keahlian, dan pengetahuan organisasi. Yang penting adalah bahwa setiap elemen Persyaratan Topikal dipertimbangkan dan dinilai, kemudian penilaiannya didokumentasikan dan disimpan.

Persyaratan Topikal menyediakan elemen dalam tiga area tata kelola, risiko, dan pengendalian yang perlu dinilai oleh auditor internal. Akan tetapi, tidak seluruh elemen dalam Persyaratan Topikal dapat berlaku untuk setiap penugasan. Selain itu, auditor internal juga dapat melakukan pekerjaan yang “ekstra” daripada elemen dalam Persyaratan Topikal. Misalnya, aspek tambahan mungkin perlu ditinjau oleh auditor internal berdasarkan hasil penilaian risikonya atau sebagai persyaratan hukum yang berlaku untuk organisasinya.

Panduan Pengguna yang komprehensif menyertai setiap Persyaratan Topikal untuk membantu menyamakan persepsi auditor dalam menjalankan audit berbasis risiko serta memperkuat relevansi audit internal dalam mengatasi perluasan dan perkembangan risiko. Di tengah ketidakpastian, tentunya para pemangku kepentingan membutuhkan jaminan dalam pengambilan





keputusan. Audit berbasis risiko dapat mengantisipasi pelebaran risiko organisasi dan memberikan kepercayaan diri kepada pimpinan organisasi, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan untuk mengetahui kekuatan organisasi.

Bagaimana praktiknya dalam lingkup pemerintah Indonesia? Auditor internal pemerintah dinaungi oleh organisasi profesi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI). Guna menjaga mutu hasil pengawasan intern, AAPI menerbitkan standar dengan mengacu pada standar profesi auditor internal profesional yang dirumuskan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA) global. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) memodifikasi beberapa bagian standar global untuk menyesuaikan dengan

karakteristik organisasi pemerintahan di Indonesia. SAIPI diperbaharui secara periodik setiap lima tahun sekali. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Peraturan Nomor PER-01/AAPI/DPN/2021 yang menyatakan bahwa penyempurnaan dan evaluasi atas standar dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, perubahan kondisi, dan lingkungan audit intern di masa mendatang.

Apakah pada penyempurnaan selanjutnya SAIPI perlu dilengkapi dengan *extension*? Jika perlu, menurut Pembaca, topik apa saja yang perlu masuk dalam Persyaratan Topikal SAIPI untuk meningkatkan mutu praktik audit internal pemerintah?

(P. M. Nancy Nareswari, Ayu Isnı A.)

BERGURU DI NEGERI KANGGURU,

*Menimba Ilmu
di Negeri Tirai Bambu*



Ketika masa depan bangsa ditentukan di ruang-ruang kelas, bagaimana kita memastikan bahwa anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan sebaik yang didapatkan di luar negeri? Pertanyaan ini menjadi semakin penting ketika melihat posisi Indonesia dalam berbagai survei internasional yang menunjukkan urgensi reformasi pendidikan.

Secara etimologis, kata “pendidikan” berasal dari bahasa Yunani “*paedagogie*”, yang terdiri dari kata “*paes*” (anak) dan “*agogos*” (membimbing). Dengan demikian, “*paedagogie*” berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Menurut KBBI, pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri mereka, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.

Maka dari itu, pendidikan dapat dikatakan sebagai upaya untuk membangun sumber daya menjadi lebih baik, unggul dan berakhlak. Beberapa negara dapat dikatakan telah mampu menciptakan sistem pendidikan yang efektif, di antaranya Australia dan China. Kedua negara ini memiliki sistem pendidikan yang diakui secara global. Menurut laporan PISA (*Programme for International Student Assessment*) 2022 yang dirilis oleh OECD, China dan Australia menempati peringkat tinggi dalam kemampuan membaca, matematika, dan sains, sementara Indonesia masih masuk dalam jajaran “*bottom*” dalam tiga kemampuan tersebut.¹ Keunggulan sistem pendidikan kedua negara ini dapat menjadikannya sebagai rujukan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, termasuk bagi Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam pemerataan dan kualitas.



Pendidikan di Australia

Sistem pendidikan di Australia mencerminkan sejarah panjang dan perkembangan masyarakatnya yang beragam. Sejak kedatangan penjajah Inggris pada tahun 1788, Australia telah mengalami perubahan besar, dari koloni menjadi negara merdeka dengan identitas yang kuat.²

Australia memiliki sistem pendidikan yang berkembang pesat dengan pendekatan fleksibel dan berorientasi pada penguasaan keterampilan serta berbasis penelitian. Pendidikan di negara ini mencakup jenjang prasekolah, dasar, menengah, dan tinggi, serta didukung oleh institusi pendidikan vokasi. Australia menerapkan sistem pendidikan wajib mulai usia lima hingga 16 atau 17 tahun, tergantung pada negara bagian. Struktur pendidikannya terdiri dari:

- **Pendidikan Dasar (*Primary School*):** tahun 1–6 atau 7
- **Pendidikan Menengah (*Secondary School*):** tahun 7 atau 8 hingga tahun 12

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, siswa dapat memilih antara pendidikan tinggi atau pelatihan vokasional. Kurikulum nasional di Australia memberi fleksibilitas bagi negara bagian untuk menyesuaikan kebijakan pendidikan sesuai kebutuhan lokal. Mata pelajaran inti mencakup Bahasa Inggris, Matematika, Sains, Humaniora, Seni, Teknologi, serta Pendidikan Jasmani dan Kesehatan.³

Pendekatan desentralisasi dalam pendidikan Australia memberi keleluasaan bagi masing-masing negara bagian dalam menerapkan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan

kebutuhan lokal serta memungkinkan sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Meskipun, hal ini juga menimbulkan tantangan dalam standarisasi kualitas di seluruh wilayah. Kemudian, tantangan lainnya seperti kesenjangan akses bagi komunitas adat, integrasi siswa internasional, dan ketimpangan pendanaan antarwilayah.⁴ Meski begitu, pendekatan ini terbukti efektif dalam menciptakan lulusan yang kompetitif secara global.⁵

Pemerintah Australia terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui program pelatihan guru, pengembangan kurikulum yang inklusif, serta penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih baik. Pendidikan tinggi di Australia mengutamakan pendekatan praktis dengan penggunaan studi kasus, proyek lapangan, dan kelas diskusi interaktif guna mendorong partisipasi mahasiswa. Teknologi juga semakin berperan dalam pembelajaran melalui *platform digital* dan metode *e-learning*.⁶



Pendidikan di China

Berbeda dengan Australia, China dikenal dengan sistem pendidikannya yang disiplin dan berorientasi pada prestasi akademik. Peribahasa “Tuntutlah ilmu sampai ke negeri China” mencerminkan bagaimana pendidikan di negara ini sangat dihargai. Sejak usia dini, siswa didorong untuk mencapai hasil maksimal dalam pembelajaran yang intensif. Mata pelajaran seperti Matematika, Sains, dan Bahasa Mandarin menjadi prioritas utama, sementara ujian ketat menentukan jenjang pendidikan selanjutnya. Hal tersebut dikarenakan, sistem pendidikan di China sangat menekankan pada prestasi akademik.⁷

Pendidikan wajib di China berlangsung selama sembilan tahun, yang terdiri dari:

- **Sekolah Dasar:** enam tahun (usia 6–7 tahun)
- **Sekolah Menengah Pertama:** tiga tahun

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, siswa dapat memilih melanjutkan ke sekolah menengah atas atau pendidikan vokasi. Pemerintah China menekankan pentingnya pendidikan dasar yang kuat sebagai fondasi bagi pendidikan tinggi. Kurikulum nasional di China dirancang secara terpusat, meskipun

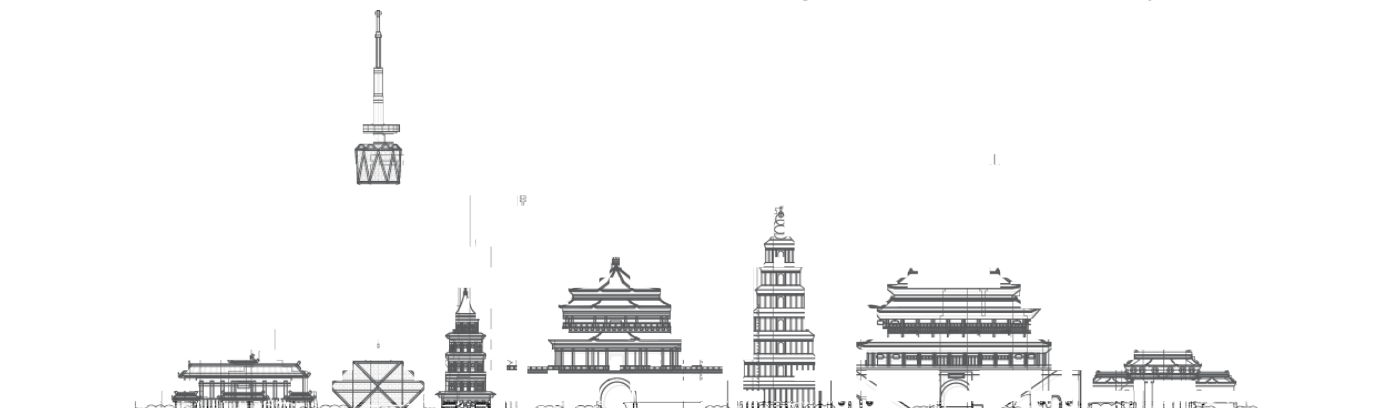
implementasinya dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah.⁸

Sistem pendidikan China masih banyak mengandalkan metode ceramah dan latihan soal, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mulai mendorong pembelajaran berbasis kreativitas dan pemikiran kritis. Bahasa Mandarin, Matematika, dan Sains tetap menjadi mata pelajaran utama, dengan bahasa asing seperti Inggris mulai diajarkan sejak kelas tiga sekolah dasar.⁹

Di China, guru diklasifikasikan berdasarkan kualitas dan pengalaman. Siswa memiliki hak untuk mengevaluasi kinerja guru secara objektif, sementara pemerintah terus meningkatkan kesejahteraan tenaga pengajar melalui pelatihan dan tunjangan tambahan. Baru-baru ini, China juga meluncurkan rencana pembangunan “negara pendidikan yang kuat” untuk periode 2024–2035, yang mencakup perluasan pendidikan gratis secara bertahap dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi.¹⁰

Bagaimana dengan Indonesia?

Meskipun Australia dan China memiliki pendekatan yang berbeda dalam pendidikan, kedua negara ini menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas sumber daya



manusia. Australia mengedepankan fleksibilitas dan pengembangan keterampilan, sementara China menekankan disiplin dan prestasi akademik. Tentunya, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari kedua pendekatan tersebut untuk memperbaiki kualitas pendidikan nasional.

Saat ini, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketimpangan akses pendidikan antarwilayah, distribusi guru yang belum merata, hingga rendahnya kualitas lulusan. Namun begitu, Deputy Bidang Pembangunan Manusia Bappenas, Amich Alhumami, menegaskan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, peningkatan kualitas pendidikan menjadi prioritas utama.¹¹

Jika Indonesia ingin mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, maka reformasi pendidikan harus menjadi prioritas. Upaya ini dimulai dari hal-hal mendasar. Untuk mengatasi ketimpangan akses dan kualitas, langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan sarana/prasarana serta guru tersebar secara merata

di seluruh wilayah termasuk daerah yang terpencil atau kurang terjangkau; meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru untuk menjawab masalah kompetensi tenaga pendidik; menyusun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja guna mengatasi rendahnya kualitas lulusan; serta memastikan setiap anak Indonesia memiliki akses pendidikan yang setara, tanpa terkendala wilayah atau latar belakang sosial ekonomi. Setelah fondasi ini kuat, Indonesia dapat melangkah lebih jauh dengan mengembangkan keterampilan abad ke-21 dan mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran, sebagaimana yang telah diterapkan oleh Australia dan China dalam sistem pendidikan mereka.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Indonesia bisa, tetapi bagaimana kita - pemerintah, pendidik, dan masyarakat - berkomitmen memastikan bahwa perubahan ke arah yang lebih baik itu benar-benar terjadi. Apakah Indonesia siap bertransformasi dan mengejar ketertinggalan dalam pendidikan?

(Yulia Pramita Rahman)

REFERENSI

1. OECD. (2022). PISA 2022 Results. <https://www.oecd.org/pisa/>
2. Nauli, N., Mislaini, M., & Angraini, S. (2025). Sistem Pendidikan di Australia. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 3(1), 319-331.
3. Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority. (2023). *Australian Curriculum Overview...* <https://www.acara.edu.au>
- Australian Institute for Teaching and School Leadership. (2023). *Educational Equity in Australia...* <https://www.aitsl.edu.au>
4. Australian Institute for Teaching and School Leadership. (2023). *Educational Equity in Australia...* <https://www.aitsl.edu.au>
5. Education Council of Australia. (2023). *National Education Policy Report*. <https://www.educationcouncil.edu.au>
6. Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority. (2023). *Australian Curriculum Overview...* <https://www.acara.edu.au>
7. Putra, A. (2017). Mengkaji dan Membandingkan Kurikulum 7 Negara (Malaysia, Singapura, Cina, Korea, Jepang, Amerika dan Finlandia).
8. Annur, S., Kasenda, I., & Mahardini, D. F. (2024). Studi Perbandingan Pendidikan: Sistem Pendidikan Indonesia dan China. *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 4(3), 1678-1683.
9. China Education Daily. (2023). *Reforming Education in China*. <http://www.ce.cn/edu>
10. Nurrijal, N. (2024). Analisis Perbandingan Sistem Pendidikan Negara-negara Maju Sebagai Komparasi Kemajuan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Biologi Babasal*, 7-20.
11. Bappenas. (2023). *RPJPN 2025–2045: Transformasi Pendidikan di Indonesia*. <https://www.bappenas.go.id>

QUIET QUITTING

DI KALANGAN ASN,
BERBAHAYAKAH?



Pukul 07.58 WIB, Tole terburu-buru memarkir motornya di halaman kantor. Setahun terakhir, rutinitasnya tak berubah: melakukan *finger print*, *scanning* disposisi dari atasan, menyelesaikan laporan, lalu menunggu waktu pulang. Dulu, setiap menyelesaikan satu penugasan, ia selalu menanyakan kepada atasannya apakah ada tugas lain. Pulang melebihi jam kantor, dan bahkan melanjutkan pekerjaan di sela-sela akhir pekan adalah hal biasa. Namun, antusiasme itu menguap setelah ia merasa seakan tidak punya waktu lagi untuk dirinya sendiri dan keluarga. Tugas demi tugas bertubi-tubi, sementara tidak sedikit rekan lainnya yang ia lihat lebih santai, datang dan pulang *teng-go*, bahkan sempat *nge-game* di kantor. Kini, Tole memilih 'jalan aman': bekerja sesuai SOP tanpa inisiatif lebih. "Ngapain capek-capek, yang penting gaji lancar dan SKP aman," ujarnya.

Ilustrasi kisah Tole di atas adalah wajah dari fenomena *quiet quitting* yang mulai menggerogoti semangat kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Muda. *Quiet quitting* merujuk kepada perilaku pekerja yang melakukan tugas minimal sesuai dengan kontrak kerja tanpa melampaui harapan. Istilah ini mulai viral pascapandemi COVID-19, di mana para pekerja mulai menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi¹.

Pembatasan Psikologis

Quiet quitting bukan tentang mengundurkan diri fisik, melainkan lebih kepada pembatasan psikologis atas ekspektasi kerja, menandakan pengunduran diri secara mental dan emosional dari pekerja². Fenomena

ini termanifestasi sebagai sikap patuh minimalis: hadir tepat waktu, menyelesaikan tugas administratif, namun enggan terlibat dalam program/kegiatan ekstra. Laporan Gallup (2022) menunjukkan bahwa hampir 50% pekerja di USA mengidentifikasi diri mereka sebagai *quiet quitters*³. Sementara di Jerman, 34% pegawai pemerintah hanya bekerja 'seperlunya'⁴⁵. Di Indonesia, tren ini terutama terlihat di kalangan pekerja muda seperti generasi milenial dan Gen Z, yang lebih memilih keseimbangan hidup daripada kerja berlebihan tanpa kompensasi yang jelas, sebagaimana yang dilaporkan oleh McKinsey (2023)⁶, di mana 67% pekerja muda menempatkan kesehatan mental dan keseimbangan hidup sebagai prioritas utama⁷. Fenomena *quiet quitting* di kalangan ASN memiliki dimensi yang unik karena terpantik dari birokrasi yang hierarkis dan budaya senioritas yang sering mematikan kreativitas.

Apabila dicermati, fenomena *quiet quitting* pada sektor publik memperlihatkan akar masalah yang lebih kompleks daripada sekadar besaran gaji. Beberapa faktor utama yang mendorong fenomena *quiet quitting* di kalangan pekerja muda di Indonesia dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Paradoks Produktivitas

Meskipun reformasi manajemen PNS sudah cukup lama, sistem penilaian kinerja masih dipandang *rigid*, terfokus pada kuantitas dokumen, bukan kualitas layanan, sehingga menciptakan paradoks produktivitas. Maka muncullah stigma: "Lebih mudah dapat nilai bagus dengan membuat 100 surat undangan rapat daripada memperbaiki satu program yang bermasalah." Akibatnya, banyak pekerja



muda merasa *undervalued* karena penghargaan tak sebanding dengan loyalitas yang dituntut.⁸

Kesehatan Mental dan Beban Kerja

Pandemi meningkatkan kesadaran generasi muda akan pentingnya keseimbangan hidup. Lonjakan kasus *burnout* di sektor publik pascapandemi terjadi terutama di kalangan pekerja yang berhubungan langsung dengan layanan publik.⁹ Survei lain menunjukkan bahwa sebanyak 27% ASN mengalami gejala *burnout*. Sebagian dari mereka kemudian bertahan dengan melakukan tugas minimalis. Minimnya apresiasi dan sistem dukungan psikologis memaksa pekerja mengadopsi *quiet quitting* sebagai mekanisme bertahan.

Sistem Karier dan Insentif

Generasi muda menginginkan jalur karier yang transparan, namun sebagian besar sektor publik masih bergantung pada senioritas. Sebuah studi pada tahun 2023 menunjukkan 68% pekerja muda merasa stagnan jika tidak ada peluang pengembangan karier dalam dua tahun⁷.

Keberadaan tunjangan kinerja yang bisa mencapai 300% dari gaji pokok bahkan berisiko menjadi bumerang, karena perhitungannya belum benar-benar berdasarkan kinerja¹⁰. Akibatnya, motivasi untuk berinovasi menjadi stagnan, pegawai muda pun enggan berinvestasi lebih dalam pekerjaan. Bahkan, 54% pekerja muda siap pindah kerja apabila tidak ada perkembangan karier¹¹. Jika sistem promosi masih bergantung pada lama kerja atau kedekatan dengan atasan, bukan kompetensi, maka generasi muda yang idealis pastilah cepat frustrasi.

Solusi: Membangun Birokrasi yang Lebih Manusiawi

Di tengah tantangan *quiet quitting* yang kian mengemuka di kalangan ASN Muda, transformasi birokrasi bukanlah sekadar menuntut kerja keras tanpa henti, melainkan tentang sebuah ekosistem kerja yang lebih manusiawi. Birokrasi yang mampu mengakomodasi aspirasi dan potensi setiap individu akan menciptakan atmosfer kerja yang mendukung inovasi, kolaborasi, dan

keberlanjutan. Lalu, apa saja yang bisa dilakukan para manajer organisasi sektor publik?

Merombak Sistem Penghargaan

Penerapan sistem penghargaan berbasis penilaian *stakeholders* menawarkan terobosan yang menarik untuk meningkatkan produktivitas ASN. Studi menunjukkan bahwa model ini mampu meningkatkan produktivitas hingga 40% dengan menggabungkan insentif ekstrinsik—seperti bonus dan kenaikan gaji—dengan motivasi intrinsik berupa kepuasan melihat dampak positif pekerjaan terhadap masyarakat¹²¹³. Di beberapa kota besar di Indonesia, proyek percontohan yang melibatkan publik dalam proses penilaian layanan telah memberikan dampak nyata. Kepuasan masyarakat mencapai angka yang signifikan dan memberikan motivasi tambahan bagi ASN untuk terus berbenah.

Memperkuat Jalur Aspirasi

Tidak sedikit budaya birokrasi yang menghambat ide-ide brilian. Riset menyebutkan bahwa hingga 72% inovasi ASN terhambat karena kekhawatiran akan disalahkan apabila terjadi kegagalan¹². Konsep *psychological safety* menjadi kunci dalam membuka ruang bagi kreativitas. Keberadaan forum yang memungkinkan ide internal tergalikan secara rutin akan memungkinkan setiap pegawai untuk menyampaikan gagasan inovatif tanpa takut mendapatkan stigma negatif. Seperti halnya *Innovation Lab* pada Pemerintah Singapura yang mengalokasikan 15% waktu kerja untuk eksperimen ide, pendekatan ini mendorong terjadinya dialog terbuka dan mengintegrasikan masukan langsung ke dalam kebijakan publik.



Mengadopsi Kerja Hybrid

Era digital menuntut fleksibilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam lingkungan kerja ASN. Keberhasilan pola kerja *hybrid* yang dimulai pada situasi pandemi COVID-19 semestinya dapat diadopsi secara lebih luas, apalagi dalam situasi pengetatan anggaran. Laporan Gallup (2022) menunjukkan bahwa generasi Z sangat menghargai fleksibilitas semacam ini, yang pada akhirnya meningkatkan loyalitas dan mengurangi tingkat *burnout*³. Oleh karena itu, sektor publik harus semakin adaptif dalam menyusun kebijakan kerja yang berbasis hasil, bukan sekadar kehadiran fisik.

Pendidikan Berkelanjutan

Di tengah dinamika perubahan teknologi, pendidikan dan pelatihan tidak boleh terhenti, bahkan bagi para ASN. Program-program seperti kuota khusus dari LPDP untuk ASN telah membuka akses menuju pengembangan diri yang lebih mendalam. Namun, diperlukan kurikulum yang adaptif agar para abdi negara tidak terjebak dalam persepsi bahwa belajar adalah sesuatu yang hanya dilakukan di awal karier.



Program *Digital Leadership Academy* di Jerman, yang menargetkan 90% pejabat publik, menjadi bukti nyata bahwa pendidikan berkelanjutan dapat mengubah paradigma kerja di sektor publik¹². Selain itu, penerapan model *Competency-Based Career Path* seperti yang dijalankan di Kanada membuka peluang bagi PNS untuk mendapatkan sertifikasi sebagai syarat promosi, sehingga setiap langkah karier didasarkan pada kompetensi yang terukur dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Epilog: *Quiet Quitting* sebagai Alarm Reformasi

Fenomena *quiet quitting* di kalangan ASN Muda perlu dipandang sebagai

cermin retak birokrasi kita. Generasi muda yang sebenarnya potensial memilih 'mogok diam' karena sistem tak memberi ruang bernapas. Namun, krisis ini bisa menjadi momentum emas. Transformasi birokrasi menuju sistem yang lebih manusiawi dan responsif akan memulihkan semangat ASN, membuat kerja pelayanan publik lebih bermakna. Menjadikan setiap laporan bukan sekadar tumpukan kertas, tetapi sebagai cerita tentang masyarakat yang terbantu. Maka, merespons *quiet quitting* sebagai bahasa protes kaum milenial yang rindu perubahan adalah dengan mendengarkan bisikannya, sebelum berubah menjaditeriakan.

(Agus Sulistyo)

REFERENSI

1. Joshi, R. & Khullar, L. (2024). *Alleviating quiet quitting through employee value proposition and the moderating role of internal communication*. Int Res J Adv Engg Mgt, 2(03), 198–205. <https://doi.org/10.47392/irjaem.2024.0031>
2. Zuzelo, P. (2023). *Discouraging quiet quitting*. Holistic Nursing Practice, 37(3), 174–175. <https://doi.org/10.1097/hnp.0000000000000583>
3. Gallup. (2022). *State of the Global Workplace Report*.
4. OECD. (2023). *Working Paper on Quiet Quitting in Government Contexts*.
5. Hamouche, S., Koritos, C. & Papastathopoulos, A. (2023). *Quiet quitting: Relationship with other concepts and implications for tourism and hospitality*. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 35(12), 4297–4312. <https://doi.org/10.1108/ijchm-11-2022-1362>
6. McKinsey. (2023). *[Informasi terkait laporan McKinsey mengenai keseimbangan hidup pekerja]*.
7. Galanis, P., Katsiroumpa, A., Vraha, I., Siskou, O., Konstantakopoulou, O., Κατσούλας, Θ., ... & Καϊτελίδου, Δ. (2023). *The influence of job burnout on quiet quitting among nurses: The mediating effect of job satisfaction*.
8. Pevec, N. (2024). *The concept of identifying factors of quiet quitting in organizations: An integrative literature review*. Izzivi Prihodnosti, 8(2, May 2023). <https://doi.org/10.37886/ip.2023.006>
9. Edú-Valsania, S., Laguía, A. & León, J. (2022). *Burnout: a review of theory and measurement*. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(3), 1780. <https://doi.org/10.3390/ijerph19031780>
10. BPS. (2023). *[Data rerata gaji PNS di Indonesia]*.
11. Dai, Z., Li, J., Wang, F., Wang, L. & Wang, Y. (2023). *Organizational management: quiet quitting's mitigation strategies for organizational response*. Journal of Education Humanities and Social Sciences, 19, 25–32. <https://doi.org/10.54097/ehss.v19i.10944>
12. Dewi, L., Hamid, A. & Sekarsari, R. (2023). *Experiences of infection prevention and control nurses (IPCNS) in performing their roles and duties in the Indonesia army central hospital: A qualitative descriptive study*. Belitung Nursing Journal, 9(2), 145–151. <https://doi.org/10.33546/bnj.2482>
13. Nchimbi, A. & Korojelo, S. (2021). *Uplifting motivation of Tanzanian public service personnel for improved service delivery: The reflection of public service motivation theory*. JAAS. <https://doi.org/10.7176/jaas/75-04>

PENGARUH BELANJA PENDIDIKAN DAN KUALITAS GURU TERHADAP KUALITAS DAN DISTRIBUSI PENDIDIKAN DI INDONESIA

Kajian dari Narulita Ratih Wulansari

Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan minimal 20% APBN dan APBD untuk sektor pendidikan, tetapi tantangan utama bukan lagi akses, melainkan peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan. Studi ini mengungkap bahwa belanja pendidikan memiliki hubungan non-linear terhadap capaian akademis siswa—efektif pada tahap awal, tetapi menjadi kurang efisien jika tidak dikelola dengan baik. Sementara itu, kualitas guru terbukti berperan signifikan dalam meningkatkan nilai Ujian Nasional serta mengurangi ketimpangan pendidikan. Dengan menggunakan

metode Gini Index, penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan masih tinggi, terutama di luar Jawa-Bali, dan dipengaruhi oleh distribusi guru berkualitas serta infrastruktur pendidikan. Studi ini menekankan perlunya peningkatan efisiensi anggaran pendidikan dan kebijakan insentif bagi guru agar distribusi pendidikan lebih merata. Apakah belanja pendidikan yang besar akan berdampak tanpa strategi yang tepat? Temuan ini mengajak pembaca untuk merefleksikan efektivitas kebijakan pendidikan dalam meningkatkan daya saing SDM Indonesia.

ANALISIS BANTUAN PENDIDIKAN PADA SISWA MISKIN DI INDONESIA: STUDI KASUS DI SMP KABUPATEN HINAI DAN TANJUNG PURA

Kajian dari Muhammad Rizky Asmen

Perangkap kemiskinan kerap menghambat akses pendidikan bagi siswa miskin, yang pada akhirnya memperbesar kesenjangan ekonomi. Kajian ini menginvestigasi efektivitas bantuan pendidikan dalam meningkatkan partisipasi

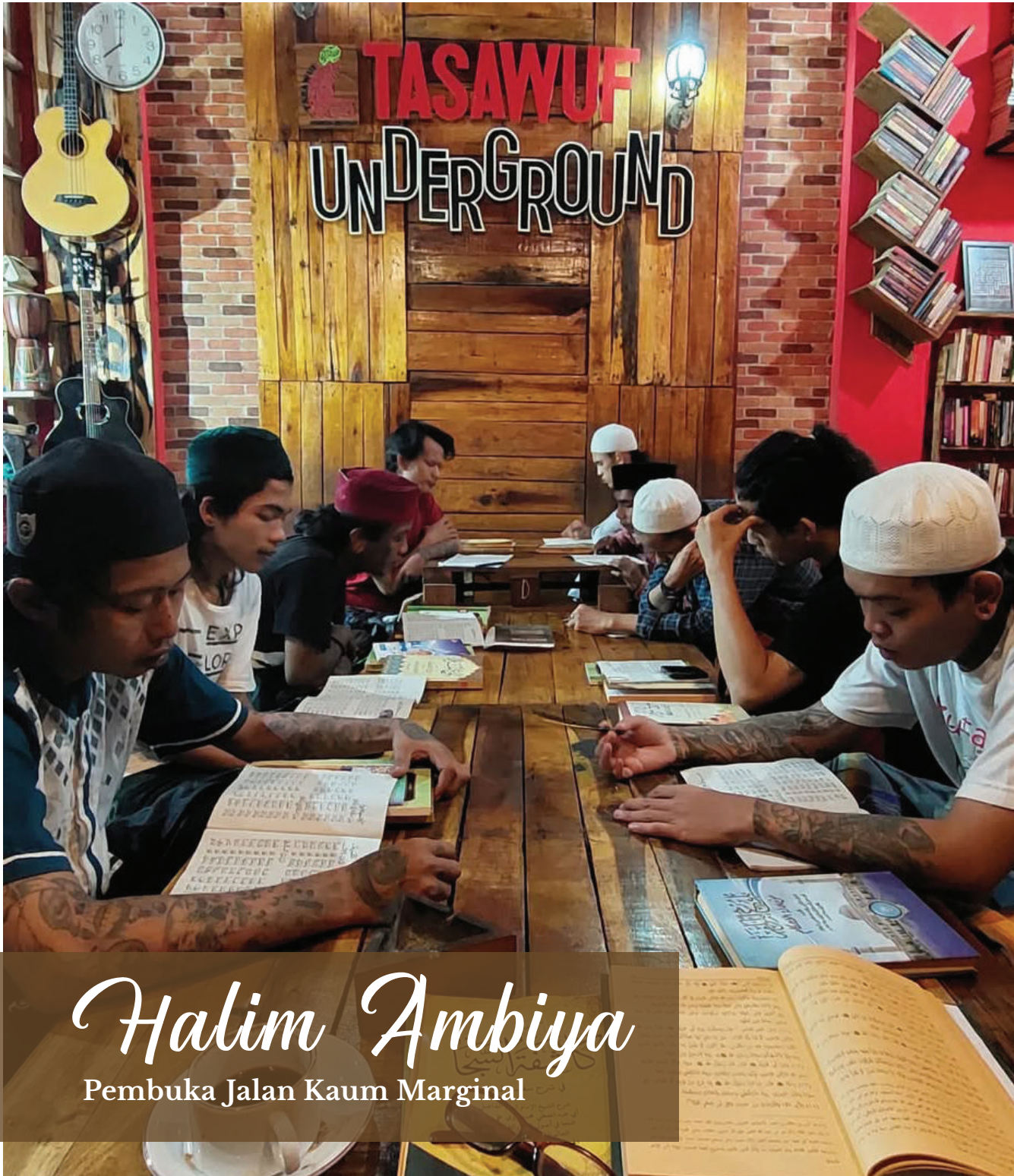
dan capaian akademis siswa dari keluarga kurang mampu. Dengan metode survei dan wawancara terhadap guru di Kabupaten Hinaí dan Tanjung Pura, penelitian ini menemukan bahwa kendala utama bukan hanya biaya pendidikan, tetapi



juga rendahnya motivasi belajar serta minimnya dukungan orang tua. Program bantuan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH) telah membantu secara finansial, namun masih terdapat permasalahan dalam penyalurannya. Kajian ini juga menyoroti perlunya penguatan program pendampingan akademik seperti kursus tambahan dan

kolaborasi sekolah-orang tua untuk mencegah putus sekolah. Dengan berbagai inisiatif yang telah ada, apakah sistem pendidikan Indonesia sudah cukup inklusif bagi siswa miskin? Kajian ini mengundang pembaca untuk mengeksplorasi kebijakan yang lebih efektif dalam memastikan akses pendidikan yang berkelanjutan bagi seluruh anak bangsa.





Halim Ambiya

Pembuka Jalan Kaum Marginal



Orang pada heran lihat kami bertato, pakai anting salat dan mengaji di masjid.

Tapi mereka tidak pernah heran orang tak bertato yang tak pernah salat dan mengaji di masjid,"

Perkataan itu terlontar di bibir Achil (35), seorang pemuda punk penuh tato di sekujur tubuhnya, yang memilih jalan berhijrah dengan bergabung di komunitas Tasawuf Underground.

Ya, sebagian masyarakat menganggap anak punk adalah berandal, orang miskin, pengangguran, pemalas, dan kehidupannya dekat dengan kriminalitas. Punk acap kali diidentikkan dengan orang-orang urakan dan kriminalitas.

Namun, bagi Halim Ambiya, stigma hanyalah tembok yang harus diruntuhkan. Dikenal sebagai Ustaz Halim, ia merangkul dan membina anak punk serta anak jalanan dengan pendekatan yang jauh dari menghakimi.

Lewat **Pondok Tasawuf Underground**, Halim membuka pintu bagi mereka yang ingin menemukan arah baru dalam hidup. Dengan pendekatan yang hangat dan tanpa paksaan, ia mengajak mereka mengenal ilmu dan agama, bukan untuk mengubah identitas mereka, tetapi untuk memberi makna yang lebih dalam pada kehidupan yang mereka jalani.

"Siapa pun senang didengar, dirangkul, diringankan bebannya dan keluwesan

hatinya diajak kepada kebaikan. Sebab demikianlah sejatinya fitrah suci manusia," katanya.

Inspirasi Perubahan

Keputusan Halim untuk mendekati komunitas punk dan anak jalanan tak lepas dari pengalaman pribadinya. Saat berada di perbatasan Malaysia-Thailand, ia pernah menjadi korban perusuh dan hampir terjebak dalam situasi yang mengancam nyawanya. Namun, sekelompok anak punk justru datang membantunya keluar dari situasi itu. Pengalaman itu meninggalkan kesan mendalam, membuatnya bertanya: mengapa kelompok yang sering dicap negatif justru menjadi penyelamatnya?

Sejak saat itu, Halim mulai mendekati komunitas punk di Jakarta, tepatnya sejak tahun 2012. Awalnya, ia merancang pengajian di kafe dengan nama Sufi After Hours, membahas iman dan ketakwaan di lingkungan yang lebih santai. Namun, perjalanannya membawanya ke tempat yang berbeda—ke pinggir jalan, ke kolong jembatan, ke *basecamp* anak punk. Ia sadar, justru di sanalah ajakan untuk berubah lebih dibutuhkan.

Ambil Peran, Menjadi Bagian Mereka

Mendekati anak punk dan anak jalanan bukanlah perkara mudah. Bagi Halim tak segampang membalikkan telapak tangan, butuh pendekatan dan waktu yang ekstra. Pasalnya, mereka menganggap pendekatan yang ia lakukan seperti terkesan ingin memanfaatkan situasi dan kondisi. Halim memahami hal itu, ia tak langsung berbicara soal agama atau perubahan hidup. Ia mengamen bersama mereka, makan

di pinggir jalan, berbagi tawa, hingga akhirnya membangun kepercayaan.

Pendekatan itu membuahkan hasil. Perlahan, mereka yang awalnya menutup diri mulai membuka hati. Beberapa tertarik untuk belajar membaca huruf hijaiyah, memahami makna salat, dan mengenal zikir. Halim mengajarkan mereka bukan dengan doktrin keras, tetapi dengan kesabaran dan kasih sayang.

"Kita harus memahami situasi mereka dulu. Baru pelan-pelan masuk, ngobrol dari hati ke hati."



Padukan Pendidikan Formal dan Agama

Halim memahami bahwa hijrah bukan sekadar perubahan spiritual, tetapi juga tentang bagaimana seseorang dapat bertahan hidup dengan cara yang lebih baik. Banyak anak punk dan anak jalanan yang ingin berubah, tetapi terhalang oleh tato di tubuh, masa lalu yang kelam, atau keterbatasan pendidikan.

Sebagian anak-anak jalanan dan juga anak punk sudah mengenal baca dan tulis. Namun untuk urusan pengetahuan agama mereka sangat minim. Jadilah menggabungkan konsep antara pengetahuan umum dengan pengetahuan agama.

Di Pondok Tasawuf Underground, Halim mengajarkan mereka lebih dari sekadar agama. Ia merancang pendidikan berbasis keterampilan—dari

sablon, barista, hingga kewirausahaan kecil. Dengan ini, mereka yang ingin meninggalkan jalanan punya pilihan, punya masa depan.

Bagi komunitas punk dan anak jalanan, Halim bukan sekadar ustaz. Ia adalah guru, sahabat, sekaligus ayah yang membimbing tanpa menghakimi. Ketika mereka bermasalah, Halim menjadi pendamping yang membela. Ketika mereka ragu, Halim menjadi penunjuk jalan. Lewat pendekatan persahabatan itu pula Halim bisa membantu anak punk dan anak jalanan melepaskan ketergantungan mereka pada jalanan, mengajak mereka beralih untuk melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat.

"Alhamdulillah, beberapa murid sudah ada yang menjadi sarjana, beberapa mulai merintis dunia usaha, beberapa ada yang sudah kerja," ucapnya.





Perubahan yang Menginspirasi

Kini, murid-murid Halim telah mencapai hampir 100 orang, sebagian besar berasal dari Jakarta dan sekitarnya. Kegiatan komunitas ini pun mendapat dukungan dan respons positif dari berbagai pihak, termasuk donasi makanan, sarung, hingga bantuan transportasi. Tak sedikit pula yang diundang berbagi cerita tentang perjalanan hijrah mereka, menunjukkan bahwa anak punk dan anak jalanan juga bisa diterima di berbagai kalangan.

Namun, Halim tak berhenti di situ. Ia berharap pemerintah juga ikut ambil bagian dalam upaya ini. *"Mereka punya*

potensi. Jangan hanya dicap sebagai kaum marginal yang tak punya masa depan.

Baginya, perubahan adalah hak semua orang, termasuk mereka yang hidup di jalanan. Dengan bimbingan yang tepat, anak punk dan anak jalanan bisa menjadi bagian dari masyarakat yang lebih baik. Dan Halim Ambiya, dengan Pondok Tasawuf Underground-nya, terus menjadi pembuka jalan bagi mereka yang ingin melangkah ke arah yang lebih terang.

(Fuad Rizky)

BICARA ITU *ada seninya*



Bagaimana jika kita kesulitan mengungkapkan sesuatu pada saat kita berbicara? Kata-kata yang keluar dari mulut kita kian terputus, pesan yang ingin disampaikan tidak tersampaikan dengan baik, merasa tidak didengarkan, hingga tidak percaya diri ketika berhadapan dengan orang lain. Apakah komunikasi memang serumit itu? Ataukah ada sesuatu dalam berbicara yang belum kita pahami?

Salah satu buku *best seller* dan mahakarya besar berjudul “Bicara itu ada seninya” karya pakar komunikasi terkemuka Oh Su Hyang hadir untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dalam bukunya, penulis mengungkapkan bahwa berbicara bukan hanya sekedar menyampaikan sebuah informasi, tetapi juga tentang bagaimana membangun hubungan, menciptakan kesan yang baik, dan mempengaruhi orang lain. Buku ini menjelaskan bagaimana komunikasi yang efektif bisa membawa perubahan besar dalam kehidupan kita.

Buku ini menyajikan berbagai teknik komunikasi yang dapat membantu seseorang berbicara agar lebih efektif, seperti melatih logika berbicara, konsep *story telling*, mengatasi penyebab seseorang menjadi takut untuk berbicara, serta menerapkan komunikasi nonverbal.

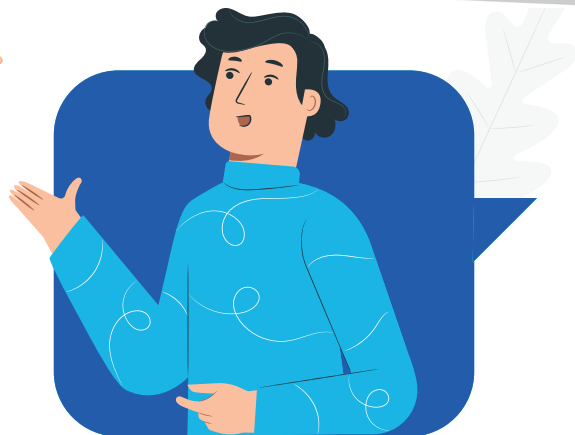
Selain itu, penulis juga memberikan sebuah rumus terapi komunikasi yang dapat diterapkan agar komunikasi kita dapat berjalan dengan efektif.

“ $C = Q \times P \times R$ (*Communication = Question x Praise x Reaction*) Dengan demikian komunikasi akan berjalan dengan efektif jika mengandung pertanyaan, pujian, dan reaksi.” (p.46)

Penulis juga menjelaskan bahwa salah satu kunci komunikasi yang efektif adalah dengan menjadi pendengar yang baik. Dalam bukunya, ia menekankan bahwa menjadi pendengar yang baik dapat membangun rasa percaya dan kedekatan dalam hubungan sosial maupun profesional. Ketika seseorang merasa didengar dan dihargai, mereka akan lebih terbuka dalam menyampaikan pemikirannya dan lebih nyaman dalam berinteraksi.

”

Tunjukkanlah dengan sungguh-sungguh bahwa Anda tertarik dengan apa yang sedang dikatakan oleh lawan bicara, sehingga dia pun akan berbuat demikian terhadap Anda. Untuk menjadi pembicara yang hebat, Anda harus terlebih dulu menjadi pendengar yang hebat.” (p.50)



Oh Su Hyang juga menekankan bahwa berbicara dengan baik bukanlah bakat bawaan dari kita lahir, melainkan keterampilan yang bisa kita pelajari dan bisa kita latih. Pembaca akan mengerti bahwa dengan keterampilan berbicara yang terus dilatih dan kesadaran akan cara berbicara yang efektif, siapa pun akan bisa menjadi pembicara yang hebat.

Keunggulan dari buku ini adalah penulisan yang mudah dipahami, ringan, menarik, dan pendekatannya yang praktis. Buku ini juga tidak hanya berisi tentang teori, tetapi juga contoh nyata dari tokoh-tokoh besar dan tips-tips yang bisa diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari kita. Selain itu, buku yang berisikan 5 bab ini bisa dibaca secara acak karena pembahasan pada setiap bab tidak berurutan satu sama lain.

Bagi kalian yang sering merasa gugup atau bahkan takut saat berbicara di depan umum, sulit menyampaikan sebuah pendapat, atau ingin meningkatkan kemampuan komunikasi, buku inilah jawabannya. Buku "Bicara Itu Ada Seninya" memberikan panduan yang jelas dan mudah dipahami untuk menjadi pembicara yang lebih baik. Pesan utama dari penulis buku ini adalah bahwa komunikasi yang baik bukan hanya soal berbicara, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa membuat orang lain merasa nyaman dan memahami apa yang ingin kita sampaikan.

Jadi, apakah berbicara itu memang ada seninya? Setelah membaca buku ini, Anda mungkin akan mulai percaya

bahwa komunikasi yang baik bukanlah sesuatu yang sulit dicapai, tetapi sebuah keterampilan yang dapat diasah dengan berusaha dan latihan yang tepat, agar kita bisa meningkatkan *value* dan kualitas diri kita.

(M Rafqi Syafril F.)



Judul:
***The Secret Habits to Master
Your Art of Speaking***

Penulis:
Oh Su Hyang

Penerbit:
**Bhuana Ilmu Populer (BIP)
Kelompok Gramedia**

Halaman:
256 halaman

Tahun Terbit
2018

ISBN
9786024553920

Genre
Non Fiksi



The Auditors

Seberapa jauh korupsi bisa disembunyikan sebelum akhirnya terbongkar?" Ya, itulah yang dikisahkan dalam series *The Auditors*, sebuah drama penuh intrik yang mengungkap bagaimana tim audit membongkar kebusukan di balik laporan keuangan sebuah perusahaan raksasa. *The Auditors* menjadi series ber-genre *action* yang menceritakan perjalanan tim audit untuk memberantas korupsi di sebuah perusahaan bernama JU Construction dibalut dengan perebutan kekuasaan antarsaudara. Series ini memiliki 12 episode dengan durasi kurang lebih 1 jam 10 menit di setiap episodenya.

JU Construction adalah perusahaan konstruksi ternama yang dimiliki oleh keluarga Hwang. Selama kakak pertama mereka masih dalam keadaan koma, perusahaan dipimpin oleh dua adiknya yaitu Hwang Se-Woong sebagai presidir dan Hwang Dae-Woong sebagai wakil presidir. Se-Woong dan Dae-Woong tidak memiliki hubungan persaudaraan yang baik. Se-Woong bertekad untuk membuat perusahaan ini kembali normal dengan merekrut ketua tim audit baru Shin Cha-Il. Sedangkan Dae-Woong merasa terganggu dengan keputusan kakaknya untuk merekrut Shin Cha-Il. Kedatangan Shin-Cha-Il membuat banyak orang tidak

menyukainya termasuk wakil presidir dan tim auditnya. Hal tersebut karena sikap Shi Cha-Il yang dingin dan teliti serta tidak membedakan siapa yang harus diaudit. Shin Cha-Il memiliki visi dan misi untuk menangkap semua tikus-tikus kecil yang berkeliaran dan merugikan perusahaan.

Sikap dingin Shin Cha-Il sangat berbanding terbalik dengan salah satu anggota timnya yaitu Han-Soo. Han-Soo adalah karyawan baru yang hangat dan sangat optimis. Kehangatan Han-Soo membuat Shin merasa Han-Soo tidak cocok dengan pekerjaan audit karena mudah percaya dengan orang tanpa adanya bukti jelas. Sedangkan, Shin dikenal dengan orang yang selalu mencurigai semua orang di sekitarnya. Han-Soo merasa tidak terima dan ingin membuktikan kepada Shin bahwa dia mampu menjadi seorang auditor yang baik.

Bermula dari Se-Woong meminta Shin Cha-Il untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa kecelakaan proyek yang baru saja terjadi. Shin Cha-Il bersama tim auditnya mulai bekerjasama melakukan investigasi terhadap peristiwa yang terjadi. Alih-alih menyelidiki peristiwa kecelakaan proyek, Shin Cha-Il dan timnya menemukan berbagai kejanggalan baru

di perusahaan. Satu-persatu tikus-tikus kantor mulai terungkap dan membuat semua orang menjadikan tim audit tim paling ditakuti di perusahaan. Ketelitian Shin Cha-Il dalam melakukan investigasi membuat banyak petinggi-petinggi perusahaan takut terungkap kasus korupsi. Wakil Presdir yang tidak menyukai Shin Cha-Il pun terus mencari cara bagaimana mengeluarkan Shin Cha-Il dari perusahaan.

Series yang terdiri dari 12 episode ini sangat menarik. Sang sutradara menggambarkan betapa rumitnya menaklukkan jaringan korupsi dalam sebuah perusahaan melalui jalan cerita yang runtut dan menarik. Para pemain memiliki sifat dan karakternya masing-masing yang *unpredictable* sehingga membuat penonton bertanya-tanya sebenarnya siapa dalang dari semua ini? Semakin naik episodenya, semakin besar masalah yang harus diaudit oleh tim audit karena melibatkan petinggi-petinggi perusahaan. Penonton akan dibuat tegang di setiap episodenya karena selalu ada *gebrakan* dari tim audit untuk membasmi para tikus-tikus kecil perusahaan.

Konflik semakin memanas ketika sang kakak yang sedang koma tiba-tiba dikabarkan meninggal dunia. Perebutan kekuasaan oleh Se-Woong dan Dae-Woong semakin memanas, mereka juga melibatkan pihak-pihak luar untuk mendukung salah satu dari mereka sebagai seorang Presdir dari JU Construction. Tak disangka, perebutan kekuasaan yang terjadi ternyata ada sangkut pautnya dengan kematian kakaknya. Lalu, siapa yang menjadi dalang kematian kakaknya? Siapa yang akan menjadi presdir selanjutnya? Menurutku *sih*, kalian langsung nonton aja biar ga



Waktu Rilis: 6 Juli 2024

Sutradara: **Kwon Young Il dan Joo Sang-gyu**

Penulis: **Choi Min Ho**

Pemain: **Shin Ha-kyun, Lee Jung-ha, Jin Goo dan Jo A-ram**

Episode: 12

Negara Asal: **Korea Selatan**

kepo. Penggunaan musik menegangkan dan jalan cerita yang tidak bertele-tele membuat series ini semakin menarik.

The Auditors tidak hanya menghadirkan cerita yang menegangkan, tetapi juga mengangkat berbagai isu sosial yang relevan dengan kehidupan masyarakat modern. Drama ini mengkritik kesenjangan sosial yang mencolok di Korea Selatan, budaya kerja yang tidak sehat, dan praktik nepotisme yang merajalela di berbagai perusahaan. Series ini mengajarkan kita bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan oleh para auditor untuk membasmi korupsi secara bahu membahu. Selain itu, dalam series ini juga mengajarkan kita untuk tetap berjuang dalam melawan ketidakadilan walau hanya sekecil biji zarah.

(Mayva Eka Wulandary)

KAWAL PENDIDIKAN, KAWAL MASA DEPAN

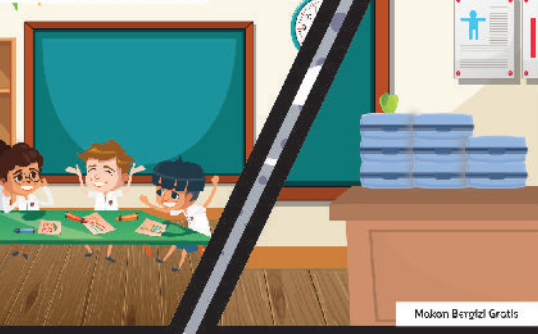
Setelah ada bantuan untuk pendidikan



Setelah ada bantuan untuk pendidikan



Suasana belajar menjadi menyenangkan



"Pengawasan Anggaran Pendidikan"



Comic by: Sintong A. Marta

Mengunjungi Suku Dayak:

Emang Bisa?





Indonesia adalah negara yang terkenal akan keberagamannya. Berbagai budaya, suku bangsa, dan bahasa ada di dalamnya. Salah satu suku bangsa asli Indonesia yang cukup unik yaitu Suku Dayak, suku asli yang berasal dan terletak di pedalaman Pulau Kalimantan. Di tengah gempuran globalisasi dan perkembangan teknologi, Suku Dayak masih kental dengan budaya dan tradisi turun temurunnya seperti kuping panjang, tato tradisional, dan tiwah. Hingga saat ini, Suku Dayak masih dipimpin oleh seorang kepala suku.

Walau lekat akan tradisi dan warisan budaya, suku Dayak tidak menutup diri dari adanya sistem pemerintahan. Sebagai suku yang berdiam diri pada suatu desa di wilayah negara Indonesia, Suku Dayak tetap menjalankan kewajibannya dalam pengelolaan dana desa yang disalurkan terhadapnya. Dalam fungsinya sebagai sebuah desa, Suku Dayak juga memiliki kepala desa yang memimpin jalannya sistem pemerintahan desa dan kepala suku dalam hal ini berperan sebagai penasihat.

Ngomong-ngomong soal dana desa, dana desa juga menjadi salah satu

objek pengawasan BPKP, lho. Kali ini penulis mau *sharing* pengalaman penulis terjun langsung melakukan evaluasi akuntabilitas keuangan dan desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Diawali dengan surat tugas, bergegas mengawal akuntabilitas di kaki Pegunungan Meratus. Bagi penulis, menjadi seorang auditor adalah tugas mulia yang harus dijalankan dengan komitmen dan tanggung jawab. Petualangan penulis kali ini berbeda dibandingkan penugasan-penugasan lainnya, karena medan yang dihadapi tidak biasa.

Membawa kertas kerja dan tanda pengenal sebagai bekal, penulis beranjak menuju Desa Atiran. Desa ini bisa dibilang salah satu desa yang jauh dari keramaian dan harus menggunakan kendaraan khusus menuju ke sana. Berangkat penugasan yang biasanya bersama-sama harus terpisah, karena untuk dapat mencapai Desa Atiran harus menggunakan motor trail. Bisa dibayangkan terjalnya medan hingga tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat. Namun bisa dibilang sebuah keuntungan pada saat itu adalah cuacanya mendukung, tidak dalam kondisi hujan, sehingga mempermudah akses menuju Desa Atiran.



Selama perjalanan penulis disuguhi dengan pepohonan nan tinggi layaknya di hutan. Perjalanan penulis tempuh sekitar dua jam tiga puluh menit dari pusat kota. Semakin mendekati Desa Atiran, akses terhadap internet semakin berkurang. Penduduk Desa Atiran sebagian besar berprofesi sebagai petani, jadi tidak terlalu bergantung pada internet. Inilah yang menjadi tantangan bagi penulis, karena harus melakukan evaluasi namun akses terhadap internet sangat minim.

Sesampainya di sana, penulis melihat rumah penduduk masih terbuat dari kayu, tidak ada satu pun bangunan yang terbuat dari beton. Kegiatan masyarakatnya sehari-hari adalah berkebun, bertani, dan berburu. Jadi, bisa dibayangkan di era modernisasi seperti saat ini, Suku Dayak masih menjalankan kehidupan yang bisa

dibidang jauh dari rutinitas masyarakat modern saat ini. Penulis juga berkesempatan untuk bertemu dan berinteraksi dengan Kepala Suku Dayak yang ada di Desa Atiran. Menurut penulis, ini adalah sebuah *privilege* dapat bercengkrama langsung dengan Kepala Suku Dayak, karena konon Suku Dayak merupakan salah satu suku yang tidak terlalu terekspos.

Tak hanya bercengkrama, penulis juga dikenalkan dengan berbagai adat dan budaya yang rutin dilakukan oleh Suku Dayak yang tentunya menambah pengetahuan penulis mengenai Suku Dayak Meratus. Penulis juga merasakan setidaknya bagaimana hidup sebagai orang yang tinggal di sekitar Suku Dayak Meratus dengan kehidupan tanpa jaringan dan telepon selama melakukan evaluasi.



Foto
BPKP
Perwakilan
Kalimantan
Timur

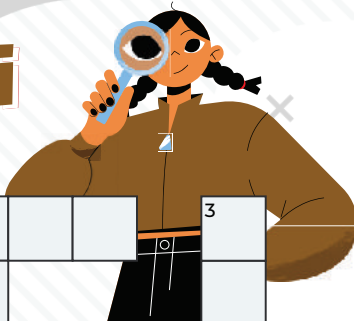
Penulis dan tim juga diizinkan untuk masuk ke balai adat tempat Suku Dayak biasanya melakukan kegiatan adat dan keagamaan. *Fyi, ga semua orang boleh masuk ke sini lho! So, it's a limited experience for us.* Mungkin kalau penulis bukan seorang auditor yang melakukan audit dana desa di Desa Atiran ini, penulis ga akan tahu gimana kondisi di dalam balai adat Suku Dayak Meratus yang tinggal di sini. Namun karena pada saat itu tidak terdapat upacara adat maupun keagamaan, jadi kalau digambarkan balai adat Suku Dayak ini di dalamnya layaknya balai yang kosong dan cukup luas untuk dilakukan upacara adat dan keagamaan.

Overall, penulis sangat senang menjadi seorang auditor dan pengalaman audit yang seru dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Ternyata masih banyak *lho* wilayah Indonesia yang sebenarnya unik dan belum terbuka untuk umum. Tapi, karena menjadi seorang auditor, penulis jadi memiliki kesempatan untuk bisa tahu lebih banyak dan lebih dahulu dibandingkan orang lainnya mengenai hal-hal unik yang ada di berbagai wilayah Indonesia. Jadi, kalian mau penulis bahas pengalaman **#MyAuditMyAdventure** di wilayah Indonesia bagian mana lagi nih?

(P. M. Nancy N., Tim BPKP Perwakilan Kalimantan Timur)



Teka Teki Sobwas



Mendatar

- 1 Policy (bahasa Indonesia)
- 4 Inovasi yang digunakan AAIPI untuk memperkuat kualitas pengawasan
- 8 Perintis (padanan kata)
- 10 Menyesuaikan dengan keadaan
- 11 Perubahan

Menurun

- 1 Terhubung atau tersambung
- 2 Akurasi
- 3 Ekspektasi
- 5 Keterkaitan (padanan kata)
- 6 Keterbukaan (padanan kata)
- 7 Pemahaman/pengetahuan
- 9 Peraturan

Ketentuan Cara Menjawab:

1. Tulis jawaban di **halaman TTS** atau di **selembar kertas**
2. **Foto/scan** jawaban
3. Kirim jawaban ke wartapengawasan@gmail.com dengan subjek: **Jawaban Teka Teki Sobwas 1/2025**
4. Cantumkan **Nama Lengkap, Nomor Telepon, Alamat Lengkap, dan Instansi>Nama Kampus (jika ASN/Mahasiswa)**

Batas pengiriman jawaban TTS: 30 Juni 2025

Pemenang terpilih akan mendapat hadiah menarik dan diumumkan di Majalah Warta Pengawasan Edisi 2/2025.

Pemenang TTS WP 4/2024:

1. Yasmin Rifdah Nuralifah- Jakarta Timur
2. Sri Wahyuni-Makassar
3. Adinata Bamantara -Solo



BPKP
#HadirBermanfaat

**Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan**

Jl. Pramuka No 33 Jakarta Timur, 13120

humas@bpkp.go.id

 [BPKPGOID](#) |  [@BPKP_ID](#) |  [@BPKPGOID](#) |  [BPKP](#) |  [WWW.BPKP.GO.ID](#)



02

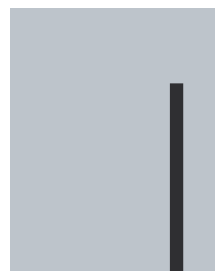
PENGARUH BELANJA PENDIDIKAN DAN KUALITAS GURU TERHADAP KUALITAS DAN DISTRIBUSI PENDIDIKAN DI INDONESIA

Oleh: Narulita Ratih Wulansari

14

ANALISIS BANTUAN PENDIDIKAN PADA SISWA MISKIN DI INDONESIA: STUDI KASUS DI SMP DI KABUPATEN HINAI DAN TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT

Oleh: Muhammad Rizky Asmen



PENGARUH BELANJA PENDIDIKAN DAN KUALITAS GURU

TERHADAP KUALITAS DAN DISTRIBUSI PENDIDIKAN
DI INDONESIA

Narulita Ratih Wulansari,

Auditor Ahli Muda pada Deputy Bidang Akuntan Negara

Abstract

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan tantangan utama bagi Indonesia dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pendidikan dan kualitas guru terhadap kualitas serta distribusi pendidikan di tingkat sekolah menengah di Indonesia. Dengan menggunakan data lintas provinsi serta metode Gini Index dalam mengukur ketimpangan pen-
dikan, penelitian ini menemukan bahwa belanja pendidikan memiliki hubungan nonlinier terhadap capaian akademis siswa, sementara kualitas guru berkontribusi signifikan dalam meningkatkan capaian akademis dan mengurangi ketimpangan pendidikan. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran pendidikan serta peningkatan kompetensi guru untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia.

dikan, penelitian ini menemukan bahwa belanja pendidikan memiliki hubungan nonlinier terhadap capaian akademis siswa, sementara kualitas guru berkontribusi signifikan dalam meningkatkan capaian akademis dan mengurangi ketimpangan pendidikan. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran pendidikan serta peningkatan kompetensi guru untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia.

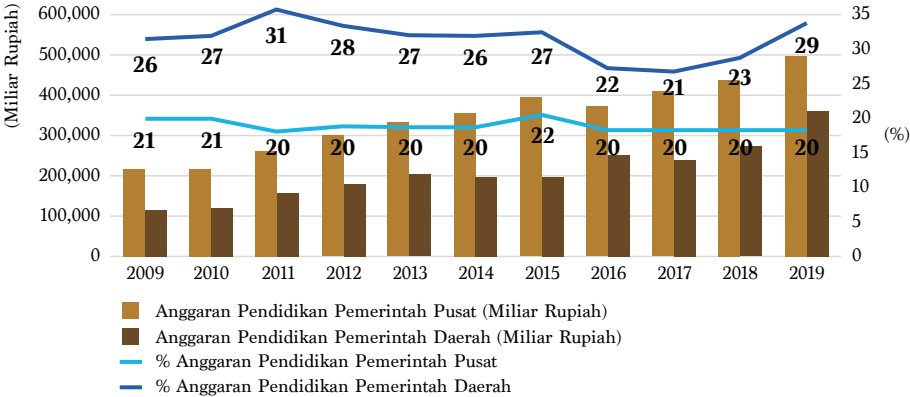
Pendahuluan

Tantangan terbesar bangsa Indonesia dalam penyediaan layanan pendidikan bukan lagi mengenai pemerataan akses pendidikan,

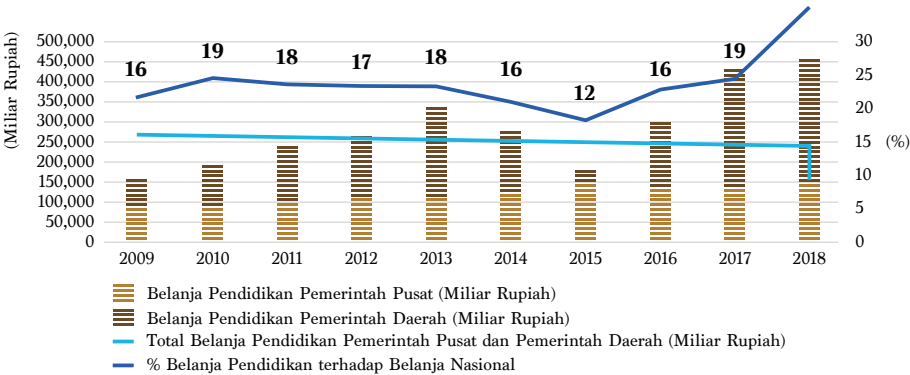
melainkan mengenai peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dan terdistribusi secara merata merupakan faktor

kunci dalam pembangunan suatu bangsa. Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan. Namun, meskipun terjadi peningkatan belanja pen-

didikan, capaian akademis siswa, yang tercermin melalui nilai Ujian Nasional (UN), masih menunjukkan tren yang stagnan atau bahkan menurun. Selain itu, distribusi pendidikan yang tidak merata menyebabkan ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antara daerah di Indonesia.



Gambar 1.1 Anggaran Fungsi Pendidikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2009-2019
Sumber: Kemenkeu



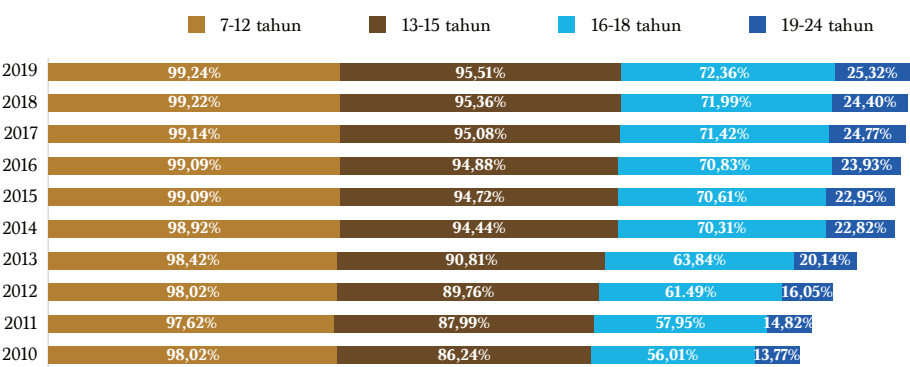
Gambar 1.2 Realisasi Belanja Fungsi Pendidikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2009-2018
Sumber: Kemenkeu

Belanja di sektor pendidikan yang telah dilaksanakan pemerin-

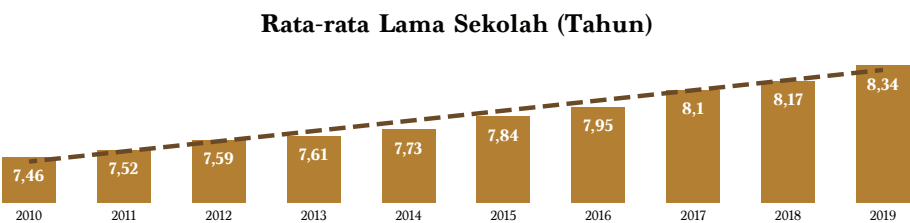
tah pusat dan pemerintah daerah telah menghasilkan *output* pendid-

dikan yang dapat menggambarkan peningkatan kinerja pemerintah dalam memperluas akses pendidikan. Indikator *output* pendidikan tersebut di antaranya adalah angka partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka partisipasi sekolah dan rata-rata lama

sekolah di Indonesia selama sepuluh tahun ini cenderung mengalami peningkatan (Gambar 1.3 & 1.4). Hal tersebut mencerminkan bahwa proporsi penduduk yang berpartisipasi dalam pendidikan dan lama periode bersekolah penduduk semakin meningkat.



Gambar 1.3 Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Indonesia Tahun 2010–2019
Sumber: BPS



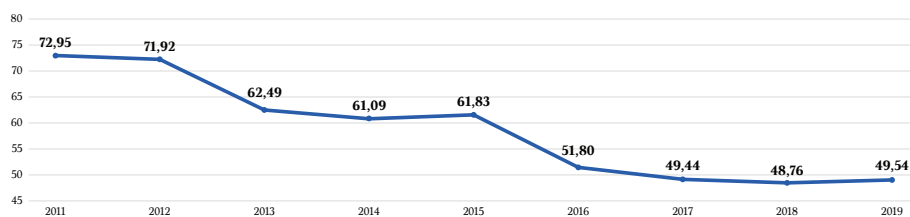
Gambar 1.4 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Indonesia Usia 15 Tahun ke Atas Tahun 2010–2019
Sumber: BPS

Akan tetapi, *mandatory spending*, peningkatan belanja pendidikan, mekanisme *reward*, dan peningkatan *output* pendidikan tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan *outcome* pendidikan. Hal tersebut tercermin dari capaian nilai Ujian Nasional (UN) siswa tingkat sekolah menengah yang

cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun (Gambar 1.5)¹. Selain itu, peringkat PISA (*Programme for International Student Assessment*) Score yang diperoleh Indonesia menunjukkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan negara lain².

Beberapa lembaga independen internasional juga menyatakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia tidak efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan³. Rendahnya capaian akademis siswa tersebut dapat mencerminkan rendahnya kualitas SDM di In-

donesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah belum efektif dalam melaksanakan belanja di sektor pendidikan karena peningkatan *input* dan *output* pendidikan tidak selaras dengan peningkatan *outcome* atau kualitas pendidikan.



Gambar 1.5 Rata-Rata Nilai Ujian Nasional Tingkat Sekolah Menengah Tahun 2011-2019
Sumber: Kemdikbud

Ketimpangan pendidikan tidak hanya berpengaruh pada sektor pendidikan itu sendiri, tetapi juga berdampak luas pada sektor ekonomi dan sosial. Individu yang mendapatkan pendidikan berkualitas lebih memiliki peluang besar dalam memperoleh pekerjaan yang lebih baik, sementara mereka yang mendapatkan pendidikan dengan kualitas rendah sering kali mengalami kesulitan dalam bersaing di pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, analisis

mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dan distribusi pendidikan menjadi penting guna menemukan solusi yang efektif dalam mengatasi permasalahan ini.

Landasan Teori

Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori utama yang menjelaskan hubungan antara belanja pendidikan, kualitas guru, dan hasil pendidikan.

¹ Nilai UN tingkat sekolah menengah merupakan rata-rata Nilai UN sekolah negeri untuk tingkat SMA dan SMK

² PISA Score Indonesia tahun 2018 berada pada urutan 72 dari 77 negara, tahun 2015 urutan 62 dari 70 negara, tahun 2012 urutan 64 dari 65 negara, dan tahun 2009 urutan 57 dari 65 negara (data didapatkan dari <https://www.oecd.org/pisa/>).

³ World Bank (2020) dalam “Indonesia Public Expenditure Review” menyatakan bahwa peningkatan belanja pendidikan secara signifikan dapat meningkatkan angka partisipasi siswa, tetapi kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah. Lowy Institute (2018) dalam “Beyond Access: Making Indonesia’s Education System Work” menyatakan bahwa sistem pendidikan Indonesia tidak dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan learning outcomes.

1. Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*)

Teori ini, yang dikembangkan oleh Becker (1964) dan Schultz (1961), menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas individu, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam konteks ini, belanja pendidikan dianggap sebagai investasi yang dapat meningkatkan kualitas SDM dan memperkecil ketimpangan pendidikan.

2. Teori Kualitas Guru (*Teacher Quality Theory*)

Teori ini berpendapat bahwa faktor utama yang menentukan efektivitas pendidikan adalah kualitas guru. Penelitian oleh Hanushek (2011) menunjukkan bahwa guru yang memiliki kompetensi tinggi berkontribusi signifikan dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Faktor seperti pengalaman mengajar, tingkat pendidikan, dan pelatihan guru menjadi elemen kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

3 Teori Ketimpangan Pendidikan (*Educational Inequality Theory*)

Berdasarkan penelitian Bourdieu dan Passeron (1977), ketimpangan pendidikan terjadi karena adanya disparitas dalam akses terhadap sumber daya pendidikan. Faktor ekonomi, geografis, dan kebijakan

publik dapat memperburuk ketimpangan ini, sehingga belanja pendidikan dan distribusi guru berkualitas menjadi penting untuk mengurangi kesenjangan pendidikan.

4. Teori Efisiensi Belanja Publik (*Public Spending Efficiency Theory*)

Musgrave (1959) menyatakan bahwa belanja publik harus digunakan secara efisien untuk mencapai hasil yang optimal. Dalam konteks pendidikan, teori ini menekankan bahwa peningkatan anggaran pendidikan harus diikuti dengan tata kelola yang baik agar benar-benar berdampak pada kualitas pendidikan dan tidak hanya menjadi pengeluaran yang tidak efektif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data antarprovinsi di Indonesia dengan periode observasi dari tahun 2011 hingga 2019. Variabel utama yang dianalisis meliputi belanja pendidikan, kualitas guru, nilai Ujian Nasional, dan Indeks Ketimpangan Pendidikan (IKP). Metode Gini Index digunakan untuk mengukur ketimpangan pendidikan berdasarkan distribusi nilai Ujian Nasional. Model regresi digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara belanja pendidikan dan kualitas guru terhadap kualitas dan distribusi pendidikan. Data diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud),

Badan Pusat Statistik (BPS), serta laporan pemerintah daerah terkait belanja pendidikan dan statistik guru.

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami lebih dalam tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pendidikan dan bagaimana efektivitas anggaran serta peningkatan kualitas guru dapat berdampak pada hasil belajar siswa.

Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan ketimpangan pendidikan antarprovinsi di Indonesia tahun 2011-2019. Untuk mendapatkan gambaran ketimpangan pendidikan, maka perhitungan IKP antarprovinsi di Indonesia perlu dilakukan. Perhitungan IKP yang digunakan dalam studi ini mengadopsi rumus perhitungan *education Gini index* yang dipelopori oleh Thomas, Wang, & Fan (2001). Berbeda dengan Thomas, Wang, & Fan (2001) yang menggunakan variabel rata-rata lama sekolah dalam menghitung IKP, dalam studi ini peneliti menggunakan variabel Nilai UN. Rumus perhitungan IKP yang digunakan

dalam studi ini adalah sebagai berikut:

$$EduGini = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{p_i}{y_i} \right) - \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \left(\frac{p_j}{y_j} \right)$$

dimana,

- EduGini* : Indeks Ketimpangan Pendidikan berdasarkan distribusi Nilai UN
- μ : rata-rata Nilai UN di suatu provinsi
- p_i dan p_j : proporsi sekolah yang mendapatkan Nilai UN kriteria i dan j
- y_i dan y_j : proporsi sekolah yang mendapatkan Nilai UN kriteria “sangat baik”
- n : nilai tengah dari Nilai UN pada kriteria i dan j

Rata-rata Nilai UN di setiap provinsi didapatkan dari data aplikasi dan *website* Kemdikbud. Nilai $n = 4$ memiliki arti bahwa jumlah kriteria Nilai UN berjumlah empat kriteria yang didasarkan pada kriteria nilai yang ditetapkan oleh Kemdikbud (Tabel 2.1). Keempat kriteria nilai tersebut adalah sangat baik, baik, cukup, dan kurang.

Secara rinci rumus *education Gini index* dapat diuraikan sebagai berikut:

$$EduGini = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{p_i}{y_i} \right) - \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \left(\frac{p_j}{y_j} \right)$$

dimana,

- | | |
|---|--|
| p_1 : proporsi sekolah yang mendapatkan Nilai UN kriteria “kurang” | y_1 : nilai tengah dari Nilai UN pada kriteria “kurang” |
| p_2 : proporsi sekolah yang mendapatkan Nilai UN kriteria “cukup” | y_2 : nilai tengah dari Nilai UN pada kriteria “cukup” |
| p_3 : proporsi sekolah yang mendapatkan Nilai UN kriteria “baik” | y_3 : nilai tengah dari Nilai UN pada kriteria “baik” |
| p_4 : proporsi sekolah yang mendapatkan Nilai UN kriteria “sangat baik” | y_4 : nilai tengah dari Nilai UN pada kriteria “sangat baik” |

Studi ini menggunakan nilai $y_1 = 27,5$, $y_2 = 62,5$, $y_3 = 77,5$, $y_4 = 92,5$ yang merupakan nilai tengah dari setiap kriteria Nilai UN yang didasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh Kemdikbud.

Apabila nilai IKP semakin mendekati angka 0, maka distribusi Nilai UN antarsekolah semakin merata. Sebaliknya, apabila nilai IKP semakin mendekati angka 1, maka distribusi Nilai UN antarsekolah semakin tidak merata. Distribusi yang semakin tidak merata mencerminkan ketimpangan kualitas pendidikan yang terjadi pada daerah tersebut semakin tinggi. Sijabat (2013) membagi ketimpangan pendidikan menjadi tiga kategori, yaitu

- $0 \leq \text{EduGini} < 0,3$: ketimpangan rendah
 $0,3 \leq \text{EduGini} < 0,5$: ketimpangan sedang
 $0,5 \leq \text{EduGini} \leq 1$: ketimpangan tinggi

Penulis melakukan perhitungan IKP menggunakan formulasi perhitungan di Microsoft Excel. IKP dihitung untuk keseluruhan 34 provinsi yang ada di Indonesia untuk periode tahun 2011 sampai 2019. Perhitungan IKP untuk provinsi Kalimantan Utara tahun 2011–2013 tidak dilakukan karena pelaksanaan UN di provinsi tersebut pertama kali dilaksanakan tahun 2014. Total perhitungan IKP yang akan didapatkan penulis dari perhitungan tersebut berjumlah 303 indeks.

Spesifikasi Model

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pendidikan dan kualitas guru terhadap Nilai UN dan IKP di Indonesia, sehingga kerangka model ekonomi yang digunakan dalam studi ini terdiri dari dua model. Kerangka model ekonomi yang digunakan dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Model 1

$$\text{UN_SMA}_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \text{BljaProv_per_Siswa}_{i,t-1} + \beta_2 \text{BljaProvSis}^2_{i,t-1} + \beta_3 \text{GuruKualProv}_{i,t-1} + \sum \beta_i X_{i,t-1} + \lambda_i + \alpha_i + \varepsilon_{i,t-1}$$

2. Model 2

$$\text{GiniEdu_SMA}_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \text{BljaProv_per_Siswa}_{i,t-1} + \beta_2 \text{BljaProvSis}^2_{i,t-1} + \beta_3 \text{GuruKualProv}_{i,t-1} + \sum \beta_i X_{i,t-1} + \lambda_i + \alpha_i + \varepsilon_{i,t-1}$$

dimana,

- $\text{UN_SMA}_{i,t}$: Rata-rata Nilai UN tingkat SMA dan SMK negeri pada provinsi i tahun t
 $\text{GiniEdu_SMA}_{i,t}$: Indeks Ketimpangan Pendidikan tingkat SMA dan SMK negeri pada provinsi i tahun t
 $\text{BljaProv_per_Siswa}_{i,t-1}$: Realisasi belanja pendidikan pemerintah per siswa SMA/K pada provinsi i tahun $t-1$

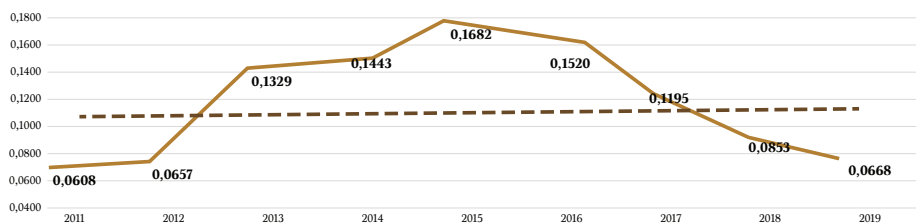
$BljaProvSis^2_{i,t-1}$	: Nilai kuadratik dari realisasi belanja pendidikan pemerintah per siswa SMA/K pada provinsi i tahun $t-1$
$GuruKualProv_{i,t-1}$	: Persentase jumlah guru SMA dan SMK negeri yang memiliki ijazah minimal D-IV atau S1 pada provinsi i tahun $t-1$
$X_{i,t-1}$	: Variabel independen kontrol pada provinsi i tahun $t-1$
λ_t	: <i>Dummy</i> tahun
α_i	: <i>Fixed effect</i> tahun
$\varepsilon_{i,t-1}$	: Komponen eror

Variabel independen kontrol yang digunakan dalam studi ini terdiri dari sembilan variabel yang didasarkan pada kondisi yang terjadi di Indonesia dan studi empiris yang digunakan sebagai landasan teori dalam studi ini. Variabel independen kontrol yang digunakan dalam studi ini dikategorikan menjadi variabel independen kontrol yang mengakomodasi karakteristik sekolah, karakteristik masyarakat, dan karakteristik pemerintah.

Hasil dan Analisis

1. Ketimpangan Pendidikan di Indonesia

Apabila ketimpangan pendidikan dianalisis menurut provinsi pada periode awal dan akhir observasi, diketahui bahwa provinsi yang mengalami penurunan ketimpangan pendidikan lebih banyak daripada provinsi yang mengalami peningkatan ketimpangan pendidikan (Grafik 4.3). Hal tersebut menunjukkan bahwa



Gambar 4.2

Indeks Ketimpangan Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah di Indonesia Tahun 2011–2019

Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan data Nilai UN dari Kemdikbud

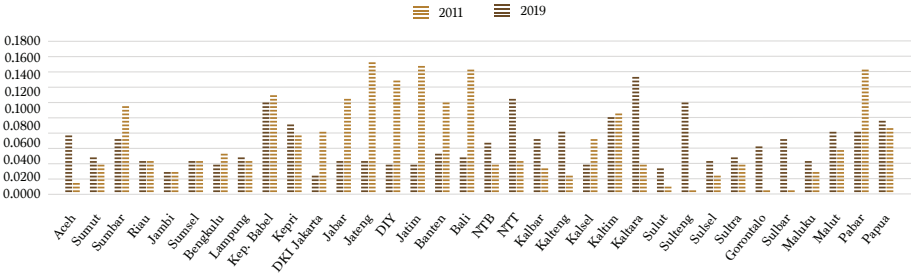
secara rerata distribusi pendidikan pada tingkat sekolah menengah di Indonesia lebih merata.

Penjelasan Gambar 4.2: IKP tingkat sekolah menengah menunjukkan tren kenaikan

sejak tahun 2011 hingga 2015, kemudian konsisten menunjukkan penurunan hingga tahun 2019. Dapat diartikan bahwa distribusi pendidikan tingkat sekolah menengah di Indonesia semakin merata sejak tahun 2016.

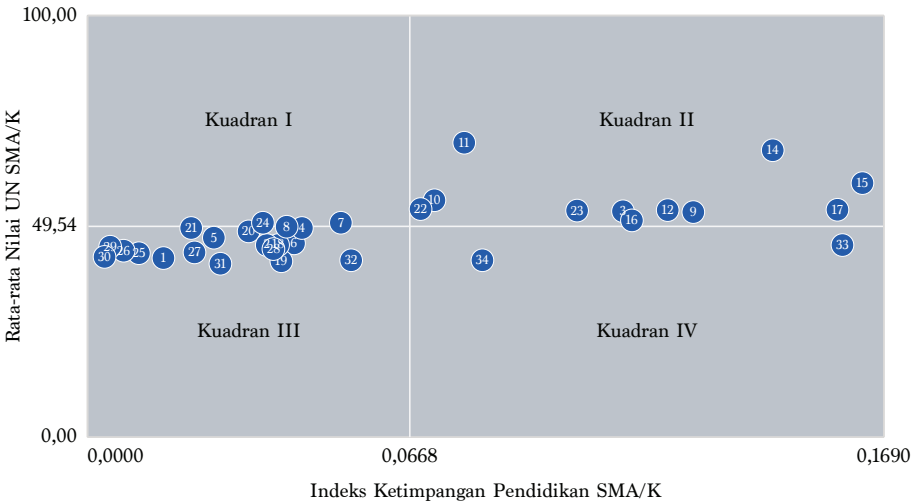
Namun demikian, apabila di analisis menggunakan Metode 4 Kuadran, dapat disimpulkan bahwa distribusi pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya menunjukkan kondisi ideal. Faktor utama yang ber-

kontribusi terhadap ketimpangan distribusi pendidikan ini meliputi infrastruktur pendidikan, akses terhadap guru berkualitas, serta alokasi anggaran pendidikan yang tidak merata.



Gambar 4.3 Perkembangan Indeks Ketimpangan Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2011 dan 2019

Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan data Nilai UN dari Kemdikbud



Gambar 4.4 Pembagian Kuadran berdasarkan Rata-Rata Nilai Ujian Nasional dan Indeks Ketimpangan Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah di Indonesia Tahun 2019

Sumber: Perhitungan penulis dan publikasi Kemdikbud

Selain itu, faktor ekonomi juga memengaruhi akses siswa terhadap pendidikan yang berkualitas, di mana siswa dari ke-

luarga kurang mampu sering kali menghadapi keterbatasan dalam mendapatkan pendidikan yang setara dengan siswa

dari keluarga lebih mampu. Ketimpangan ini semakin diperburuk oleh ketidakmerataan fasilitas pendidikan. Banyak sekolah di daerah terpencil masih kekurangan sarana dan prasarana dasar, seperti laboratorium, perpustakaan, dan akses terhadap teknologi informasi.

2. Pengaruh Belanja Pendidikan terhadap Kualitas Pendidikan

Penelitian ini menemukan hubungan berbentuk *inverted U-shaped* antara belanja pendidikan dan nilai Ujian Nasional. Artinya, peningkatan belanja pendidikan pada awalnya berdampak positif terhadap kualitas pendidikan, namun setelah mencapai titik tertentu, pengaruhnya menjadi negatif. Hal ini mengindikasikan adanya inefisiensi dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Beberapa faktor yang menyebabkan inefisiensi ini meliputi pengalokasian dana yang kurang tepat, kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran, serta permasalahan birokrasi dalam pendistribusian dana pendidikan.

Peningkatan belanja pendidikan menunjukkan peningkatan komitmen dan upaya pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Peningkatan belanja pendidikan apabila dilaksanakan secara efisien dan digunakan untuk belanja yang berkualitas akan memperluas kesempatan

siswa dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Belanja pendidikan pemerintah yang digunakan untuk peningkatan kapasitas guru, beasiswa, penyediaan buku penunjang yang berkualitas, serta pembangunan perpustakaan dan laboratorium yang berkualitas akan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan capaian akademis siswa.

3. Pengaruh Belanja Pendidikan terhadap Distribusi Pendidikan

Analisis menunjukkan bahwa belanja pendidikan memiliki korelasi negatif dengan Indeks Ketimpangan Pendidikan, yang berarti peningkatan belanja pendidikan cenderung mengurangi ketimpangan. Namun, efeknya lebih signifikan di luar Jawa-Bali dibandingkan dengan wilayah Jawa-Bali. Ini menunjukkan bahwa daerah yang sebelumnya mengalami kekurangan investasi pendidikan mendapatkan manfaat lebih besar dari peningkatan belanja pendidikan dibandingkan daerah yang sudah lebih berkembang. Oleh karena itu, distribusi dana pendidikan harus memperhatikan kebutuhan daerah secara spesifik agar dampaknya lebih merata.

4. Pengaruh Kualitas Guru terhadap Kualitas Pendidikan

Kualitas guru, yang diukur berdasarkan tingkat pendid-

dikan minimal sarjana (S1), berpengaruh positif terhadap capaian akademis siswa. Guru yang berkualitas mampu memberikan pembelajaran yang lebih efektif dan meningkatkan hasil Ujian Nasional. Selain itu, guru dengan pelatihan profesional yang memadai cenderung memiliki metode pengajaran yang lebih inovatif dan mampu menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan siswa.

5. Pengaruh Kualitas Guru terhadap Distribusi Pendidikan

Keberadaan guru berkualitas juga berdampak pada penurunan ketimpangan pendidikan, terutama di luar Jawa-Bali. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi guru yang berkualitas ke daerah-daerah terpencil dapat membantu mengurangi disparitas pendidikan antarwilayah. Sayangnya, masih terdapat tantangan dalam mendistribusikan guru berkualitas ke daerah terpencil, termasuk kurangnya insentif bagi guru untuk mengajar di daerah tersebut serta keterbatasan fasilitas pendukung bagi tenaga pengajar.

Rendahnya persentase guru berkualitas di suatu provinsi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah rendahnya minat atau kesempatan guru untuk memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Faktor yang kedua adalah rendahnya minat guru berkualitas untuk

ditempatkan di daerah tertentu dan kesulitan Kemdikbud dalam mengalokasikan guru berkualitas sesuai kebutuhan setiap daerah. Faktor yang kedua juga dapat menyebabkan terjadinya permasalahan baru, yaitu permasalahan *oversupply/undersupply* guru di beberapa daerah di Indonesia. *Oversupply/undersupply* guru dapat mencerminkan terjadinya inefisiensi alokasi dalam penyediaan layanan pendidikan di Indonesia (Lewis, Pattinasarany, & Sahn, 2011).

Kesimpulan dan Rekomendasi

Penelitian ini menyimpulkan bahwa belanja pendidikan dan kualitas guru memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas dan distribusi pendidikan di Indonesia. Namun, efektivitas belanja pendidikan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh efisiensi dalam pengelolaannya. Dengan perbaikan pada tata kelola pendidikan, transparansi anggaran, serta inovasi dalam metode pembelajaran, diharapkan sistem pendidikan Indonesia dapat menjadi lebih inklusif dan kompetitif di tingkat global.

Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan saat ini, memastikan bahwa dana pendidikan benar-benar digunakan secara efektif, serta menciptakan sistem insentif bagi guru untuk meningkatkan kinerja mereka. Dengan demikian, ketimpangan pendidikan dapat diminimalkan

dan menghasilkan SDM yang lebih unggul di masa depan.

Implikasi Kebijakan:

1. Pemanfaatan Indeks Ketimpangan Pendidikan (IKP):

Pemerintah dapat menggunakan IKP dalam formulasi kebijakan pendidikan untuk menyesuaikan strategi berdasarkan posisi daerah dalam kuadran:

- **Kuadran I:** Pertahankan kualitas dan pemerataan pendidikan.
- **Kuadran II:** Fokus pada pemerataan akses pendidikan, terutama di daerah terpencil.
- **Kuadran III:** Tingkatkan kualitas pembelajaran agar nilai Ujian Nasional (UN) meningkat.
- **Kuadran IV:** Lakukan pemerataan akses sekaligus peningkatan kualitas pembelajaran.

2. Peningkatan Efisiensi Belanja Pendidikan:

- **Efisiensi teknis:** Peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan dan evaluasi kinerja guru secara independen.
- **Efisiensi alokasi:** Prioritaskan anggaran pendidikan sesuai kebutuhan daerah, misalnya dengan menambah Guru Tidak Tetap (GTT) untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar.

3. Peningkatan Kualitas Guru di Daerah Tertinggal:

- Prioritaskan beasiswa S1/S2 bagi guru, terutama di luar Jawa-Bali.
- Tetapkan syarat minimal pendidikan D-IV/S1 dalam rekrutmen GTT untuk memastikan kualitas tenaga pengajar.

ANALISIS BANTUAN PENDIDIKAN PADA SISWA MISKIN DI INDONESIA:

STUDI KASUS DI SMP DI KABUPATEN HINAI DAN
TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT

Muhammad Rizky Asmen,

Auditor Ahli Muda pada Deputy Bidang Akuntan Negara

Pendahuluan

Kemiskinan pada dasarnya dapat berlanjut pada generasi keluarga berikutnya. Jika seorang anak lahir dalam keluarga berpenghasilan rendah, kemiskinan besar anak tersebut akan menjadi orang berpenghasilan rendah baru. Dalam ilmu ekonomi, ini disebut perangkat kemiskinan atau siklus kemiskinan. Menurut Azariadis & Stachurski (2005), perangkat kemiskinan adalah situasi di mana terdapat mekanisme *self-enforcing* yang menyebabkan kemiskinan tetap ada kecuali ada intervensi dari luar. Salah satu intervensi yang berkontribusi besar untuk menghindari jebakan kemiskinan tersebut adalah dengan memastikan anak-anak dari keluarga miskin tersebut mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini ditunjukkan

oleh hasil penelitian Pohan dan Vitale (2016) yang menyatakan bahwa pendidikan penting dalam memutus jebakan kemiskinan antargenerasi. Oleh karena itu, pendidikan bagi siswa miskin akan menjadi penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2019 angka partisipasi sekolah kasar siswa termiskin lebih rendah dibandingkan kelompok ekonomi lain, dengan penurunan lebih tajam pada tingkat pendidikan menengah atas. Lebih dari 20% siswa dari keluarga termiskin tidak melanjutkan ke jenjang SMA, yang menghambat peluang mereka untuk keluar dari garis kemiskinan. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) mengung-

kapkan bahwa garis kemiskinan pada tahun 2019 berada di angka Rp440.538,00 per kapita per bulan, dengan rata-rata anggota rumah tangga miskin berjumlah 4,58 orang. Artinya, pendapatan rumah tangga miskin berkisar Rp2.017.664,00 per bulan (Republika.co.id, 2020). Sehingga, jika kepala keluarga hanya memiliki pendidikan hingga SMP, pendapatan cenderung mendekati atau bahkan berada di bawah garis kemiskinan, memperbesar kemungkinan terbentuknya keluarga miskin baru di masa depan.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan dorongan dari pemerintah untuk meningkatkan tingkat pendidikan siswa miskin. Dalam hal ini, bantuan pendidikan dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan angka partisipasi siswa miskin, setidaknya sampai mereka lulus dari sekolah menengah. Bantuan pendidikan yang diberikan dapat berupa program peningkatan kapasitas keuangan atau pendidikan seperti bantuan finansial, subsidi pendidikan, atau program peningkatan kapasitas akademik. Namun, meningkatkan akses pendidikan saja tidak cukup. Dalam penelitian Reardon (2013), dengan melakukan studi komprehensif tentang hubungan antara prestasi akademik dan pendapatan keluarga di Amerika Serikat, ditemukan bahwa siswa berprestasi rendah sebagai sebuah kelompok memiliki kinerja yang kurang baik daripada siswa berprestasi tinggi dalam banyak

hal. ukuran keberhasilan akademik — termasuk nilai tes standar, nilai, tingkat penyelesaian sekolah menengah, dan tingkat pendaftaran dan penyelesaian perguruan tinggi. Penelitian ini jelas menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan akademik siswa miskin adalah rendah. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi penyebab utama siswa miskin tidak dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas, dan untuk mengetahui bagaimana meningkatkan kemampuan akademik mereka. Berdasarkan latar belakang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian:

1. Mengapa banyak siswa miskin tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA?
2. Program atau inisiatif apa yang efektif dalam meningkatkan kemampuan akademik siswa miskin?
3. Bantuan kemampuan akademik siswa miskin di Indonesia dapat ditingkatkan? Bantuan pendidikan tambahan apa yang diperlukan bagi mereka?

Studi ini berupaya menjelaskan bantuan pendidikan seperti apa untuk meningkatkan pendidikan bagi siswa miskin di Indonesia dengan menganalisis situasi pendidikan siswa miskin saat ini dan menyelidiki bagaimana siswa miskin dapat melanjutkan studi setidaknya sampai mereka lulus dari sekolah menengah atas.

Tinjauan Pustaka Bantuan Pendidikan di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk membantu siswa miskin melanjutkan pendidikan. Menurut Sari (2019), sejak tahun 1998, pemerintah Indonesia mulai memberikan bantuan pendidikan bagi siswa miskin dengan memberikan bantuan langsung tunai kepada sekolah dan siswa dalam beberapa program, seperti subsidi sekolah dalam program jaring pengaman sosial (JPS), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beasiswa untuk fakir miskin/ Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan bantuan tunai untuk anak-anak sebagai bagian dari Program Keluarga Harapan (PKH) (Sari, 2019).

Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) merupakan salah satu program di era Presiden BJ Habibie dan termasuk dalam kerangka Program Penyesuaian Struktural (SAP) oleh Bank Dunia bagi negara-negara kreditur untuk mengatasi dampak krisis ekonomi Indonesia di 1998. Salah satu program JPS adalah di bidang pendidikan, di mana pemerintah memberikan bantuan tunai langsung kepada siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas yang mengalami kendala biaya pendidikan. Di era Presiden B.J. Habibie, pendidikan wajib tidak gratis di Indonesia (Kapalperempuan.org, 2016). Selanjutnya, program BOS diluncurkan untuk mendanai operasional sekolah, kecuali

gaji guru dan tenaga kependidikan (Permendikbud No. 80 Tahun 2015). Kemudian, Pemerintah Indonesia memperkenalkan Program Bantuan Siswa Miskin atau BSM pada tahun 2008 untuk melengkapi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Berbeda dengan program BOS yang lebih ditujukan untuk membantu mengatasi kendala dalam hal pemungutan biaya sekolah, program BSM bertujuan untuk mengatasi biaya pendidikan tidak langsung yang dikeluarkan oleh keluarga/ rumah tangga. Kedua program tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi kendala keuangan keluarga/ rumah tangga untuk menempuh pendidikan hingga 12 tahun. Di era Presiden Joko Widodo, program BSM ini saat ini disebut Program Indonesia Pintar (PIP). PIP bertujuan untuk membantu biaya pendidikan pribadi, antara lain membeli buku, membeli seragam sekolah, membeli perlengkapan sekolah (sepatu, tas, atau sejenisnya), membiayai transportasi siswa ke sekolah, uang jajan siswa, tambahan biaya kursus/bimbingan untuk siswa di negeri dan swasta sekolah (Peraturan Sekjen Kemendikbud nomor 8 Tahun 2020). Namun, masih terdapat masalah penyaluran dana PIP yang tidak tepat sasaran. Bagi siswa yang sebenarnya sistem pengawasannya kurang baik, tidak menutup kemungkinan siswa atau orang tuanya memanfaatkan dana bantuan ini untuk keperluan lain, selain untuk kebutuhan operasional sekolah

(Larasati dan Howell, 2014). Program terakhir yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut situs kemensos.go.id (2018), situs Kementerian Sosial RI, PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditunjuk sebagai keluarga penerima manfaat. PKH merupakan Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan sebutan *Conditional Cash Transfers* (CCT), yang terbukti cukup berhasil mengatasi kemiskinan yang dihadapi berbagai negara, terutama pada kemiskinan kronis.

Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia menciptakan sistem yang disebut sistem zonasi. Dalam sistem ini, sesuai peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 14 tahun 2018, setiap sekolah negeri wajib memberikan kuota penerimaan siswa baru bagi siswa miskin minimal 20% dari kuota siswa yang akan diterima. Siswa baru yang berasal dari keluarga miskin dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lain seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk siswa miskin. Namun kebijakan pemberian kuota khusus bagi siswa miskin belum bisa dikatakan berhasil. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), angka partisipasi kasar seluruh siswa di Indonesia untuk SMA pada tahun 2017 adalah 80,11%, sedangkan pada tahun 2019, angka partisipasi menurun

menjadi 79,94%, dan menurun menjadi 78,61% pada tahun 2020. Terlihat bahwa kebijakan sistem zonasi dengan memberikan kuota khusus bagi siswa miskin belum efektif dalam meningkatkan angka partisipasi kasar di Indonesia.

Bantuan Pendidikan di Negara Lain

Beberapa negara telah berhasil mengembangkan program pendidikan yang komprehensif. Di Irlandia, *School Completion Program* (SCP) dan *Home/School/Community Liaison Scheme* (HSCL) membantu siswa berisiko putus sekolah melalui klub sarapan, bantuan setelah sekolah, kelompok pekerjaan rumah, program di luar sekolah, program liburan, program bimbingan, program dukungan pembelajaran, program pengembangan sosial dan pribadi, bantuan terapeutik, program yang membantu transisi siswa dari sekolah dasar ke sekolah menengah, membentuk kemitraan dan kolaborasi antara orang tua dan guru untuk kepentingan pembelajaran anak, serta bekerja dengan staf untuk menumbuhkan semangat kerja sama dan kerja sama dengan orang tua (OECD, 2012). Di Belanda, program *Extended Schools* dan *Parent-School Partnership* menyediakan layanan tambahan seperti untuk anak-anak, termasuk sebagai penyedia penitipan anak, layanan kesehatan dan kesejahteraan, organisasi olahraga dan budaya, serta program kemitraan orang tua-sekolah dalam mendorong proses pembelajaran, dan membentuk ikatan yang kuat

antara proses membesarkan dan mendidik. Program ini kebanyakan melayani siswa berprestasi rendah. (OECD, 2012). Contoh lainnya adalah *The Comer School Development Program* (SDP) di Amerika Serikat, yang menekankan kolaborasi antara siswa, orang tua, dan sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar mendukung yang diharapkan dapat meningkatkan pengalaman belajar kaum muda minoritas miskin (Lunenborg, 2011). Studi menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua secara positif berhubungan dengan pencapaian akademik siswa (Henderson & Mapp, 2002; Jeynes, 2005; Pomerantz dkk., 2007).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif melalui survei dan wawancara. Sampel terdiri dari 20 guru SMP dari lima sekolah di Kecamatan Hinai dan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Data dikumpulkan melalui kuesioner daring dan analisis dokumen terkait yang kemudian dilanjutkan dengan proses wawancara secara daring. Wawancara secara langsung tidak dapat dilakukan karena pandemi COVID-19.

Hasil

Sebagian besar guru memiliki pandangan serupa bahwa kondisi ekonomi keluarga, khususnya kemiskinan atau hidup dalam keluarga berpenghasilan rendah,

berdampak signifikan pada proses belajar dan pencapaian akademik siswa. Salah satu kendala utama yang dihadapi siswa dari keluarga kurang mampu adalah minimnya motivasi belajar. Orang tua cenderung kurang mendorong anak untuk belajar lebih giat, bahkan dalam beberapa kasus, mereka mengizinkan atau mengarahkan anak-anaknya untuk bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Kondisi ini secara langsung menghambat perkembangan akademik siswa dan menyebabkan sebagian dari mereka tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Menurut para guru, rata-rata kemampuan akademik siswa miskin lebih rendah dibandingkan siswa tidak miskin. Situasi ini juga membuat mereka kurang termotivasi untuk melanjutkan studi

Selain faktor ekonomi, rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan menjadi hambatan lain. Masih banyak orang tua yang beranggapan bahwa pendidikan cukup sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Beberapa guru bahkan harus melakukan upaya ekstra untuk membujuk siswa yang berpotensi secara akademik agar mau melanjutkan pendidikan. Tidak jarang, guru juga berperan membujuk orang tua agar mengizinkan anaknya tetap bersekolah. Minimnya komunikasi antara guru dan orang tua menjadi tantangan tersendiri, karena interaksi biasanya hanya terjadi saat pembagian rapor siswa. Ketiadaan regulasi

yang mengatur keterlibatan orang tua dalam pendidikan turut memperumit situasi ini.

Beberapa praktik kemitraan antara sekolah dan orang tua telah berhasil diterapkan di negara lain dan dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia. Di Belanda, misalnya, sekolah membangun kemitraan erat dengan orang tua untuk memastikan anak-anak mendapatkan dukungan pendidikan yang memadai, meskipun orang tua sulit dijangkau. Sementara itu, di Irlandia, program *School Completion Program* (SCP) dan *Home/School/Community Liaison* (HSCL) memberikan dukungan belajar setelah jam sekolah serta membangun kolaborasi aktif antara guru dan orang tua untuk mendukung proses belajar siswa. Untuk mengadaptasi model ini, pemerintah pusat perlu merumuskan kebijakan yang memberikan dukungan pembelajaran setelah sekolah. Di sisi lain, pemerintah daerah dapat membuat standar pelaksanaan, termasuk metode pengajaran dan evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa kurang mampu.

Para guru juga berpendapat bahwa kursus tambahan menjadi salah satu solusi efektif untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa, terutama bagi mereka yang memiliki nilai di bawah rata-rata. Dari survei terhadap lima guru SMP di Kabupaten Hinai dan Tanjung Pura, ditemukan bahwa kebijakan kursus tambahan masih bersifat inisiatif sekolah tanpa regulasi yang

mengatur pelaksanaannya. Kursus tambahan biasanya diadakan dalam bentuk bimbingan kelompok, dengan jumlah siswa berkisar antara 20 hingga 35 orang per kelas. Meski lebih kecil dari kelas reguler, ukuran ini masih jauh dari ideal. Schanzenbach (2014) menyatakan bahwa kelas kecil lebih efektif meningkatkan prestasi, terutama untuk siswa dari keluarga berpenghasilan rendah.

Kendala lain yang ditemukan adalah tidak adanya standar evaluasi dalam pelaksanaan kursus tambahan. Frekuensi evaluasi bervariasi antar guru, mulai dari mingguan hingga hanya sekali per semester. Akibatnya, sulit untuk mengukur efektivitas kursus secara berkelanjutan dan melakukan penyesuaian saat dibutuhkan. Selain itu, keterbatasan waktu menjadi tantangan, karena beberapa siswa harus bekerja setelah jam sekolah reguler, sehingga tidak bisa mengikuti kursus tambahan secara konsisten.

Kesimpulan dan Keterbatasan Penelitian

Dari data yang dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa rendahnya tingkat keberlanjutan pendidikan siswa miskin ke jenjang SLTA sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan minimnya dukungan orang tua. Kemampuan akademik yang rendah juga membuat siswa miskin kurang termotivasi untuk melanjutkan studi. Program kemitraan orang tua-sekolah, kursus tambahan,

serta dukungan belajar setelah sekolah berpotensi menjadi solusi efektif jika diiringi dengan kebijakan yang matang dan implementasi yang terstruktur.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis terkendala oleh beberapa kesulitan dan keterbatasan keadaan. Penulis kesulitan mendapatkan data untuk mendukung penelitian ini, terutama mengenai kemampuan mengajar setiap guru. Apalagi karena penelitian dilakukan di masa pandemi COVID-19, maka proses pengumpulan data dilakukan melalui survei dan wawancara dengan *tools online*. Pengamatan langsung di sekolah tidak bisa dilakukan. Selanjutnya sampel penelitian yang dapat diperoleh hanya dari guru sekolah. Penelitian selanjutnya dapat memperdalam dengan mengamati sampel dari orang tua dan siswa.

Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan tentang bantuan pendidikan pada siswa miskin di atas, hal ini dapat menyebabkan tingkat baru bantuan pendidikan untuk kebijakan siswa miskin di Indonesia. Oleh karena itu, penulis mengajukan beberapa saran kepada pemerintah untuk dipertimbangkan dalam rangka mencapai tujuan peningkatan pendidikan bagi siswa miskin di Indonesia, antara lain sosialisasi tentang pentingnya pendidikan kepada orang tua, mendorong pelaksanaan Permen-diknas. dan Kebudayaan nomor 30 tahun 2017 tentang pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan, penguatan akuntabilitas kebijakan pemerintah yang ada seperti PKH dan PIP sebenarnya cukup membantu, dan pembuatan kebijakan terkait penyelenggaraan kursus tambahan.